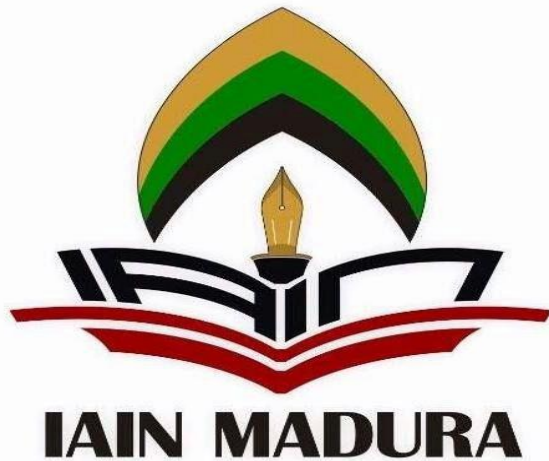


DIKTAT
PENGANTAR EKONOMI



Disusun

OLEH

Dr. R. AGOES KAMAROELLAH, MSi
NIP. 196010021994031001
NIDN. 2002106001

DIPERGUNAKAN UNTUK KALANGAN
MAHASISWA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MADURA
2018

POKOK BAHASAN

I. Konsep Dasar

1. 1. Apakah ilmu ekonomi itu?
2. Kelangkaan (SCARCITY), Pilihan (CHOICE) dan Alokasi (ALLOCATION)
3. Masalah (PROBLEMATIK) Ekonomi
4. Tujuan Kebijakan Ekonomi
5. Kebijakan Pemerintah

II. Model Aliran Melingkar

2. 1. Model Aliran Melingkar Sederhana
2. Dampak Tabungan dan investasi (Adanya Lembaga Keuangan)
3. Peranan Laba Ditahan (Retained Earnings) dan Penyusutan (Depresiasi)
4. Peranan Pemerintah
5. Peranan Perdagangan Luar Negeri

III. Produk Nasional Kotor (GROSS NATIONAL PRODUCT)

3. 1. Definisi Produk Nasional Kotor (GNP)
2. Pendekatan dalam Perhitungan GNP
3. Ukuran Lain untuk Pendapatan Nasional
4. Kelemahan GNP sebagai Ukuran Kesejahteraan

IV. Keseimbangan Pendapatan Nasional (TEORI KEYNES)

4. 1. Pendahuluan
2. Keseimbangan Pendapatan Nasional
3. Konsumsi dan Penentuan Pendapatan Nasional (GNP)
4. Perubahan Pendapatan Nasional
5. Peranan Pemerintah

V. Pasar Uang dan Tingkat Bunga

1. Kebijakan Moneter
2. Permintaan Uang untuk Transaksi
3. Analisis Kebijakan

VI. Uang

1. Peranan dan Fungsi Uang
2. Jenis Uang

VII. Lembaga Keuangan dan Kebijakan Moneter

1. Pengertian Bank
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank
3. Macam-macam kebijakan Moneter
4. Teori Klasik
5. Teori Kwantitas Uang

VIII. Inflasi

1. Pengertian Inflasi
2. Jenis Inflasi
3. Efek dan dampak Inflasi
4. Cara mencegah inflasi

IX. Perdagangan Internasional

1. Pengertian Perdagangan Internasional
2. Perdagangan dan Pembayaran
3. Teori Perdagangan Internasional
4. Neraca Pembayaran
5. Utang Luar Negeri

X. Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri dan Luar Negeri

XI. Pembangunan Ekonomi

1. Perbedaan dan Persamaan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
2. Hubungan antara Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
3. Faktor-faktor dan Kreteria
4. Pola Kebijaksanaan Pembangunan Ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

1. Baumol W.J. and Blinder A.S, *Economics, Principles and Policy*, Harcourt Brace Jovanovich, Inc, New York, Second Edition, 1992.
2. Dornbush R & Fischer, *Macro Economics*, Mc Graw- Hill Book Company, New York, 1990
3. Ferguson. C.E and Maurice S.C. *Economic Analysis, Theory and Application*, Richard D. Irwin, Homewood Illinois, 1984.
4. Kreinin, M.E. *International Economics, A. Policy Approach*, Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, New York, 1991
5. Samuelson P.A & Nordhaus, *Economics*, McGraw-Hill Book Company, New York, 13 th Edition, 1993
6. Warmke R.F. & Miller, S.L, *The Study and Teaching of Economics*, Charles E. Merrill Publishing Company Toronto, 1984

POKOK BAHASAN

I. Konsep Dasar

1. Definisi Ilmu Ekonomi

Salah satu perkataan yang sering kita ucapkan adalah bahwa setiap manusia membutuhkan barang atau jasa tertentu seperti: makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan rekreasi. Karena sumber pendapatan atau uang biasanya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan/keinginan tersebut, terpaksa untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus melakukan pilihan mana yang terlebih dahulu dibeli dan mana yang tidak / ditangguhkan pembeliannya.

Negara menghadapi masalah pilihan tersebut karena ketidakmampuan menyediakan barang dan jasa yang diinginkan / dibutuhkan masyarakat. Keinginan / kebutuhan dapat dipenuhi melalui upaya mental dan fisik.

Dengan demikian bahwa ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari upaya manusia baik sebagai individu maupun masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumberdaya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan (yang pada dasarnya bersifat tidak terbatas) akan barang dan jasa.

2. Kelangkaan, Pilihan, dan Alokasi

Kelangkaan akan barang dan jasa timbul apabila kebutuhan (keinginan) seseorang atau masyarakat lebih besar daripada tersedianya barang dan jasa tersebut. Dengan demikian kelangkaan ini muncul apabila tidak cukup barang dan jasa tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga Barang dan jasa yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan disebut dengan *barang ekonomis*. Hal ini disebabkan karena untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa tersebut memerlukan pengorbanan.

Barang ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam barang konsumsi (consumer goods) dan barang modal (capital goods).

Diktat Pengantar Ekonomi Makro ***Oleh: R.Agoes Kamaroella***

Barang konsumsi adalah barang yang dibeli oleh konsumen akhir (pengguna terakhir), sedang barang modal adalah barang yang dibeli untuk menghasilkan barang lain. Seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, bangunan pabrik dan bahan mentah atau pembantu untuk pabrik tergolong ke dalam barang modal.

Barang bebas merupakan barang yang dipergunakan untuk kebutuhan tidak memerlukan pembayaran uang, karena barang tersebut jumlahnya cukup melimpah, Seperti udara, atau air. Dengan kata lain barang bebas adalah barang yang tidak ada nilai uangnya. Apabila untuk air minum atau udara tersebut diperlukan alat / biaya untuk penjernihan misalnya, maka tidak lagi menjadi barang bebas, tetapi barang ekonomi

Tidak semua kebutuhan / keinginan akan barang dan jasa itu dipelajari di dalam ilmu ekonomi. Hanya kebutuhan akan barang dan jasa ekonomi saja yang dipelajari. Kita kadangkala membutuhkan rasa cinta pada seseorang atau keluarga, rasa dihormati orang lain dan sebagainya, namun kebutuhan ini tidak dipelajari oleh ilmu ekonomi, kecuali apabila untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan uang. Misalnya, kebutuhan / keinginan untuk mengurangi rasa takut dengan cara konsultasi kepada psikiater (dan tentu saja harus membayar dengan uang) termasuk di dalam pelajaran ilmu ekonomi.

Kebutuhan manusia pada dasarnya lebih besar daripada barang dan jasa yang tersedia, maka perlu diadakan pemilihan / alokasi. Oleh karena itu pula sumberdaya, seperti tanah, tenaga kerja dan modal, untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut harus dialokasikan penggunaannya. Baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan menghadapi masalah alokasi sumberdaya tersebut

Sebagai contoh, seseorang mempunyai uang Rp 10.000,-. Harga tiket bioskop Rp 10.000,- dan satu porsi bakmi juga Rp 10.000,- Individu tersebut tidak bisa mempunyai keduanya, nonton bioskop dan membeli bakmi, uangnya tidak cukup. Dia harus mengadakan pilihan. Apabila dia nonton, maka makan bakso dikorbankan, atau sebaliknya apabila dia makan bakmi maka kesempatan nonton bioskop terpaksa dikorbankan. Apabila dia nonton, maka biaya riil atau ongkos alternatif (*Opportunity Cost-Nya*) adalah makan bakmi.

Dengan demikian oskos alternatif adalah nilai / kesempatan yang dikorbankan / hilang karena pemilihan penggunaan sumberdaya untuk penggunaan tertentu.

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Masyarakat secara keseluruhan atau negara pun dihadapkan pada masalah pilihan / alokasi ini, sehingga konsep ongkos alternatif ini juga penting. Misalnya satu negara yang lagi perang, memilih untuk menghasilkan senjata dengan mengorbankan pembangunan jalan, sekolah atau produksi pertanian.

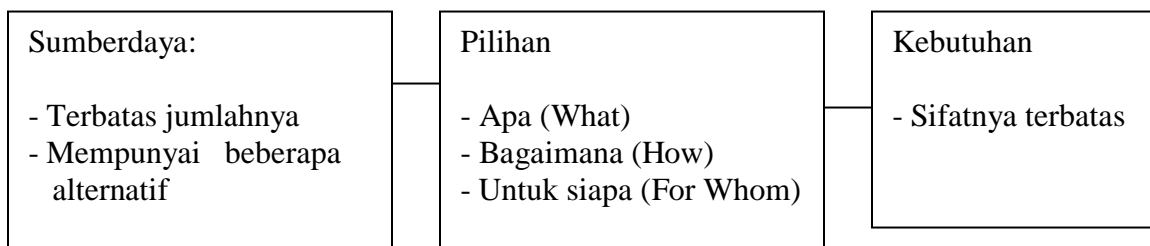
3. Masalah (*PROBLEMATIK*) Ekonomi

Masalah yang dihadapi oleh individu maupun masyarakat di dalam memenuhi kebutuhannya (yang sifatnya tidak terbatas) dengan sumberdaya yang terbatas tetapi mempunyai beberapa alternatif penggunaan adalah *memilih / alokasi*. Masalah memilih (*choice*) inilah yang disebut dengan masalah ekonomi. Sering dikatakan masalah ekonomi adalah “*The art of choice*” (seni memilih)

Pemilihan / alokasi ini meliputi jawaban yang harus diberikan oleh setiap individu, masyarakat maupun negara terhadap pertanyaan berikut:

- a. Barang dan jasa apa yang akan dihasilkan (*What*)
- b. Bagaimana barang dan jasa tersebut dihasilkan (*How*)
- c. Untuk siapa barang dan jasa tersebut dihasilkan (*For whom*)

Secara skematis masalah ekonomi, yakni pemecahan terhadap pertanyaan what, how dan for whom dapat digambarkan sebagai berikut.



Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Masalah ekonomi ini timbul karena :

Kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas, sedangkan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas (*scarce*), namun mempunyai alternatif penggunaan. Oleh karena itu manusia harus melakukan pilihan: What, How dan For whom.

Dasar atau prinsip pemilihannya adalah dengan sumberdaya tertentu diupayakan pemenuhan kebutuhan sebanyak-banyaknya. Atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu diupayakan penggunaan sumberdaya sekecil-kecilnya. Hal ini disebut dengan *prinsip ekonomi*.

Masalah Ekonomi Negara Maju dan Negara yang sedang Berkembang.

a. Kemiskinan dan Keterbelakangan.

Apabila suatu negara pendapatan per kapita rendah tentu ada sebab-sebabnya, yang perlu dilihat bagaimana mengatasi kemiskinan tersebut. Sebab-sebab kemiskinan tersebut adalah:

1. Rendahnya produktivitas pertanian. Kebanyakan negara yang miskin didominasi sektor pertanian sangat besar. Namun tidak mesti negara yang didominasi pertanian selalu miskin, lihat saja Australia, Denmark dan New Zealand, negara pertanian tetapi pendapatan perkapita tinggi.

Jadi yang membuat negara itu miskin bukan karena didominasi pertanian, tetapi rendahnya produktivitas pertanian. Hal ini disebabkan karena luas pertanian sempit, teknologinya sederhana, adanya tanah-tanah *absentee* yang akan menyebabkan petani penggarap tidak terdorong bekerja keras karena sebagian besar hasilnya dinikmati pemilik tanah yang tinggal di kota.

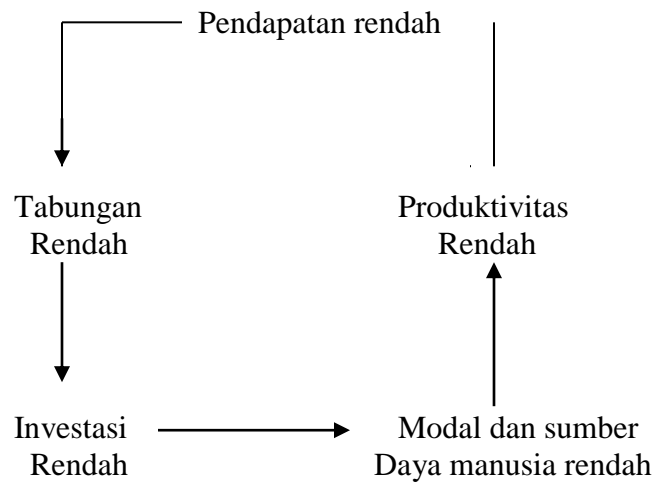
2. Kurangnya prasarana dan sarana mengakibatkan terjadinya fragmentasi ekonomi. Sukar untuk membangun pasar nasional yang terintegrasi karena transportasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya masih relatif kurang.

3. Sektor moneter yang belum maju. Banyak negara yang pendapatannya per kapitanya rendah sektor moneternya juga belum berkembang sehingga menyulitkan upaya pembentukan modal. Pembangunan dapat terhambat.

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

4. Kurangnya pendidikan dan tenaga terampil. Pertumbuhan ekonomi sangat erat dengan tenaga terampil dan pendidikan. Negara miskin, system pendidikannya juga lemah dikarenakan tidak mempunyai dana untuk mengembangkan pendidikan.
3. Tabungan rendah di negara miskin biasanya disebabkan sektor swasta lemah. Sebagian besar pendapatannya digunakan untuk konsumsi, sehingga tabungan rendah, akibatnya pembangunan terhambat.

Permasalahan di atas merupakan satu lingkaran yang tak berujung pangkal (vicious circle) bagi negara yang berpendapatan perkapitanya rendah. Secara sederhana lingkaran permasalahan tersebut digambarkan sebagai berikut:



b. Pertumbuhan penduduk yang cepat

Berkaitan dengan kemiskinan adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila laju pertumbuhan pendapatan melebihi laju pertumbuhan penduduk. Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan investasi yang besar. Banyak negara berkembang yang kekurangan dana untuk investasi. Ironisnya pada saat yang bersamaan negara berkembang tersebut juga mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga pendapatan per kapitanya menurun. Banyak pemerintah negara berkembang menggalakkan proyek keluarga berencana guna meningkatkan pendapatan per kapita.

Hanya apabila laju pertumbuhan penduduk lebih rendah dari laju pertumbuhan produksi, negara tersebut dapat meningkatkan pendapatan per kapita.

c. Pengangguran

Tingkat pengangguran yang tinggi mencerminkan bahwa sumberdaya tidak / belum digunakan sepenuhnya. Negara berkembang biasanya mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi, bahkan sering pendidikan dan latihan belum banyak dilakukan. Pengangguran kadangkala sebagai konsekuensi keterbelakangan perekonomian. Belakangan ini negara maju pun mengalami tingkat pengangguran yang tinggi. Bagaimanapun tingkat kemajuan ekonomi suatu negara, apabila jumlah barang yang dihasilkan melebihi jumlah yang diminta akan ada kecenderungan munculnya pengangguran.

d. Inflasi

Inflasi yang tinggi merupakan masalah ekonomi. Tenaga beli uang (pendapatan) turun. Masyarakat yang pendapatannya tetap akan merugikan sedangkan yang berpenghasilan tidak tetap kadangkala diuntungkan. Dengan demikian inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan

e. Kegagalan Pasar.

Di Negara yang sudah maju sekalipun sering mekanisme pasar tidak dapat bekerja dengan sempurna, lebih-lebih negara berkembang, campur tangan pemerintah kadangkala dominan. Timbulnya monopoli dapat merusak pasar. Apabila pemerintah ingin memelihara keseimbangan ekonomi perlu mengatur monopoli tersebut.

Belakangan ini banyak negara sangat memperhatikan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan. Polusi udara atau air dapat menimbulkan biaya riil, seperti banyak orang sakit, burung-burung atau ikan yang mati, yang tidak diperhitungkan dalam biaya proses produksi. Oleh karena itu masalah polusi perlu diatur.

f. Pemerataan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selamanya menguntungkan, terutama apabila diikuti dengan distribusi pendapatan yang tidak merata.

Pemerintah melalui kebijaksanaan fiskal misalnya, dapat mengurangi dampaknya terhadap pemerataan.

4. Tujuan Kebijakan Ekonomi

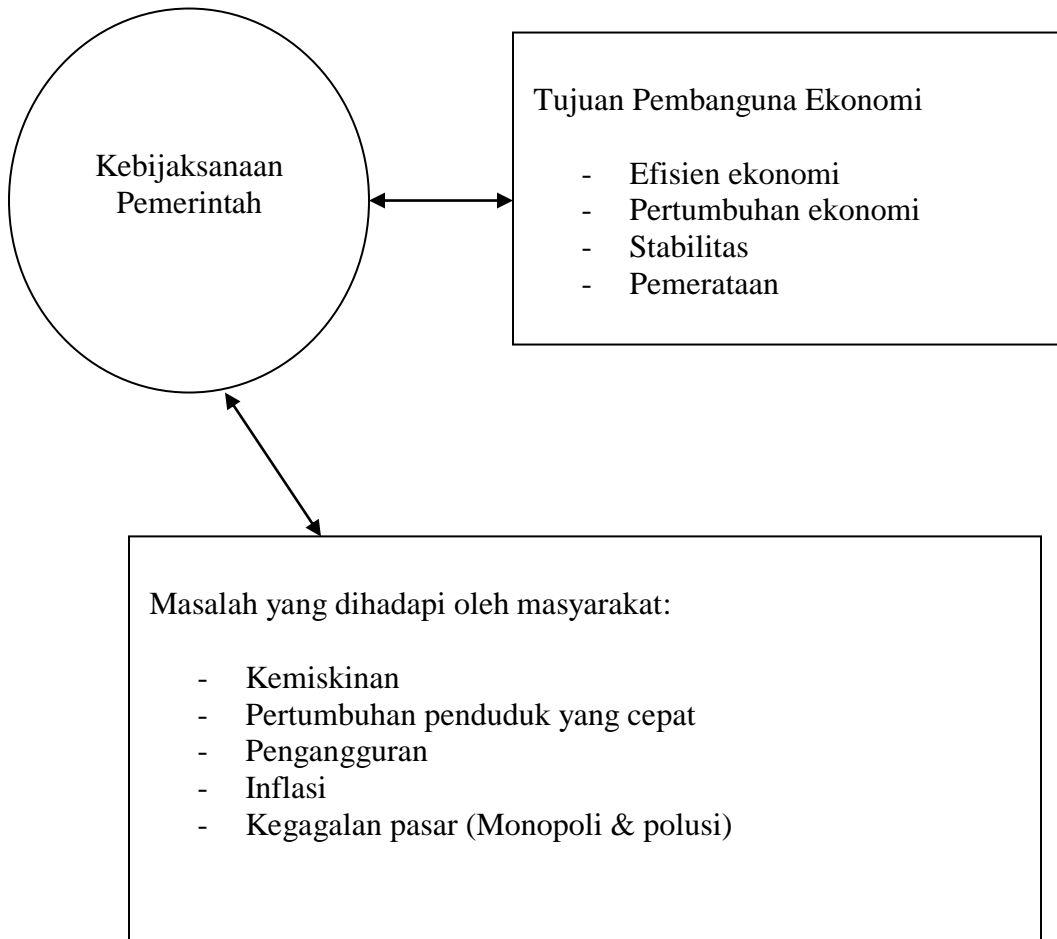
Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Apapun system ekonomi yang dianut oleh satu negara kebijaksanaan ekonomi pada umumnya ditujukan untuk mencapai:

- a. Efisiensi ekonomi, yakni upaya menggunakan sumberdaya yang terbatas secara efisien. Efisiensi dapat dilihat baik dari segi konsumen, produsen, pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Seringkali terjadi konflik antara tujuan satu pihak dengan pihak lain. Misalnya, petani mungkin melalui penggunaan input atau teknologi baru dapat meningkatkan efisiensi, tetapi mungkin menimbulkan surplus produksi padi secara nasional.
 - b. Pertumbuhan ekonomi, yakni upaya meningkatkan standar hidup masyarakat secara terus menerus. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dicapai melalui kemajuan teknologi, peningkatan kuantitas dan kualitas factor produksi, serta pendidikan dan latihan.
 - c. stabilitas perekonomian, yakni upaya untuk mengurangi fluktuasi kegiatan ekonomi yang disebabkan karena adanya inflasi dan pengangguran, serta kegiatan perekonomian yang cenderung lebih banyak untuk spekulasi bukan untuk produksi. Apabila harga naik dengan tajam, mungkin pengusaha menumpuk barang dengan harapan harga naik lagi. Akibatnya pengusaha lain kekurangan barang tersebut.
5. Kebijakan Pemerintah.

Kebijakan pemerintah biasanya sebagai hasil interaksi antara masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan tujuan pembangunan ekonomi

Secara skematis interaksi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

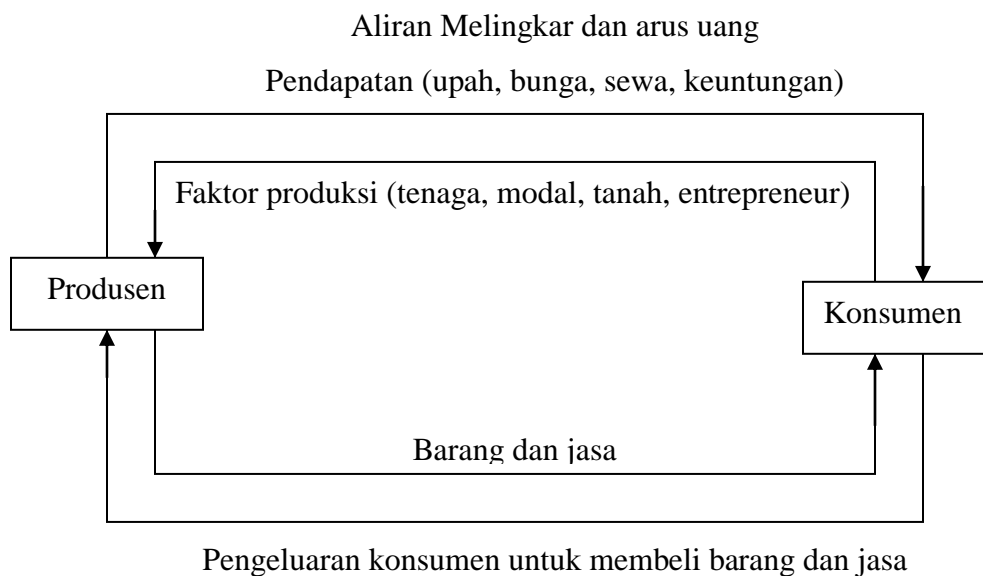


POKOK BAHASAN

II. Model Aliran Melingkar.

1. Model Aliran melingkar merupakan satu model sederhana untuk menganalisis kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi)

Model kegiatan ekonomi dapatlah digambarkan sebagai berikut:



Penjelasan gambar:

Aliran melingkar menggambarkan adanya aliran secara terus menerus barang dan jasa serta pembayaran uangnya. Ada dua pelaku kegiatan ekonomi, yakni: Konsumen (rumah tangga) serta produsen (pengusaha)

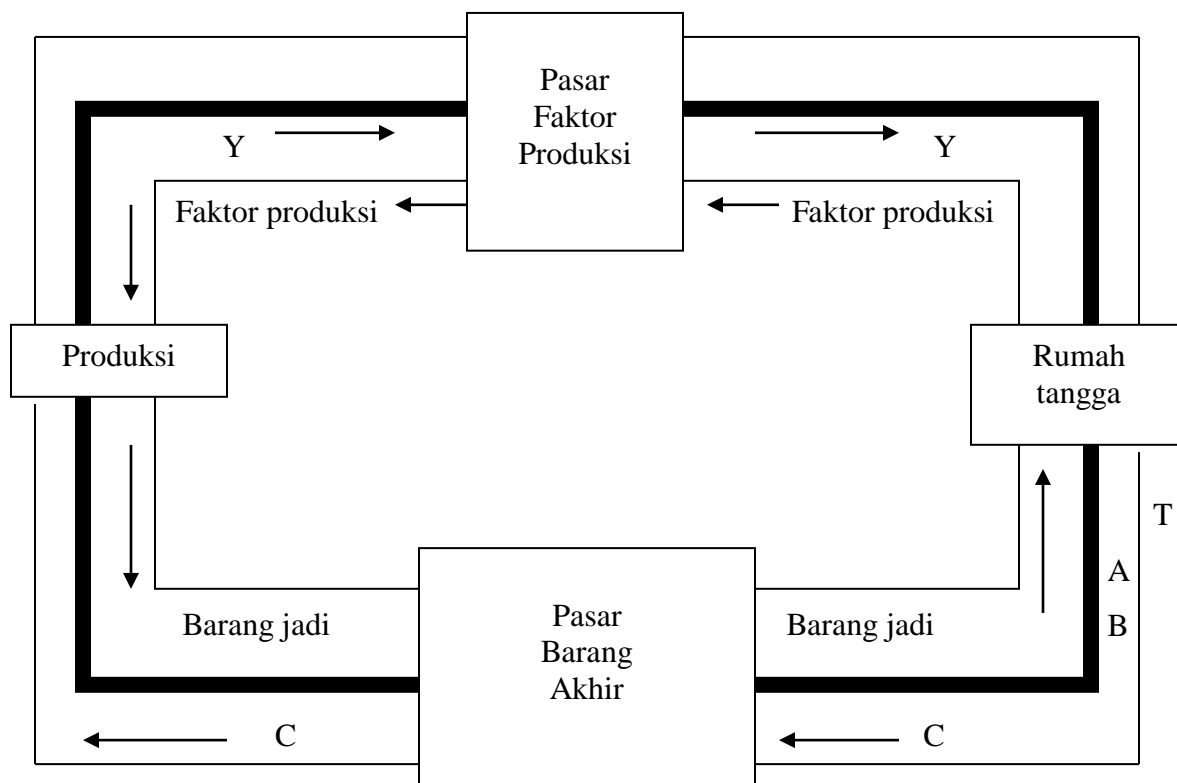
Konsumen menyediakan factor produksi (seperti: tenaga kerja, modal, tanah dan entrepreneur) kepada produsen. Produsen mengkombinasikan factor-faktor produksi tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian Barang dan jasa dijual kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai imbalan dari penyerahan factor produksi tersebut, produsen membayar harganya yang berupa, upah, bunga, sewa dan keuntungan yang merupakan pendapatan bagi konsumen (pemilik faktor produksi).

Dengan pendapatan ini konsumen dapat membayar / membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Dengan demikian terdapat aliran yang terus menerus barang dan jasa serta pembayaran uang.

2. Dampak Tabungan dan Investasi (Adanya Lembaga Keuangan)

Tabungan adalah bagian dari pendapatan konsumen yang tidak dibelanjakan / digunakan untuk konsumsi. Pendapatan yang disisihkan adalah pendapatan saat ini (current income) bukan pendapatan masa lalu yang disisihkan. Dalam analisis diagram melingkar digunakan konsep aliran (flow) pendapatan atau konsumsi, bukan akumulasi barang dan uang. Diagram aliran melingkar dengan memperhatikan adanya tabungan dapat digambarkan sebagai berikut:

Diagram aliran melingkar dengan tabungan



Keterangan :

- Y : Pendapatan atas Pembayaran faktor produksi
- C : Pengeluaran konsumen
- S : Tabungan

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Hubungan antara pendapatan, konsumsi dan tabungan dapat digambarkan sebagai berikut: $Y = C + S$. Dengan adanya tabungan berarti pengusaha membayar kepada konsumen untuk pembelian faktor produksi (Y) lebih besar daripada yang diterima dari konsumen untuk pembelian barang dan jasa (C). Dengan kata lain biaya pembelian faktor produksi lebih besar dari hasil penjualan barang, sehingga ada sebagian barang yang tidak terjual (ada persediaan barang). Untuk menghadapi keadaan tersebut dapat melakukan :

- a. menurunkan harga
- b. mengurangi produksi sampai sejumlah yang dibeli oleh konsumen

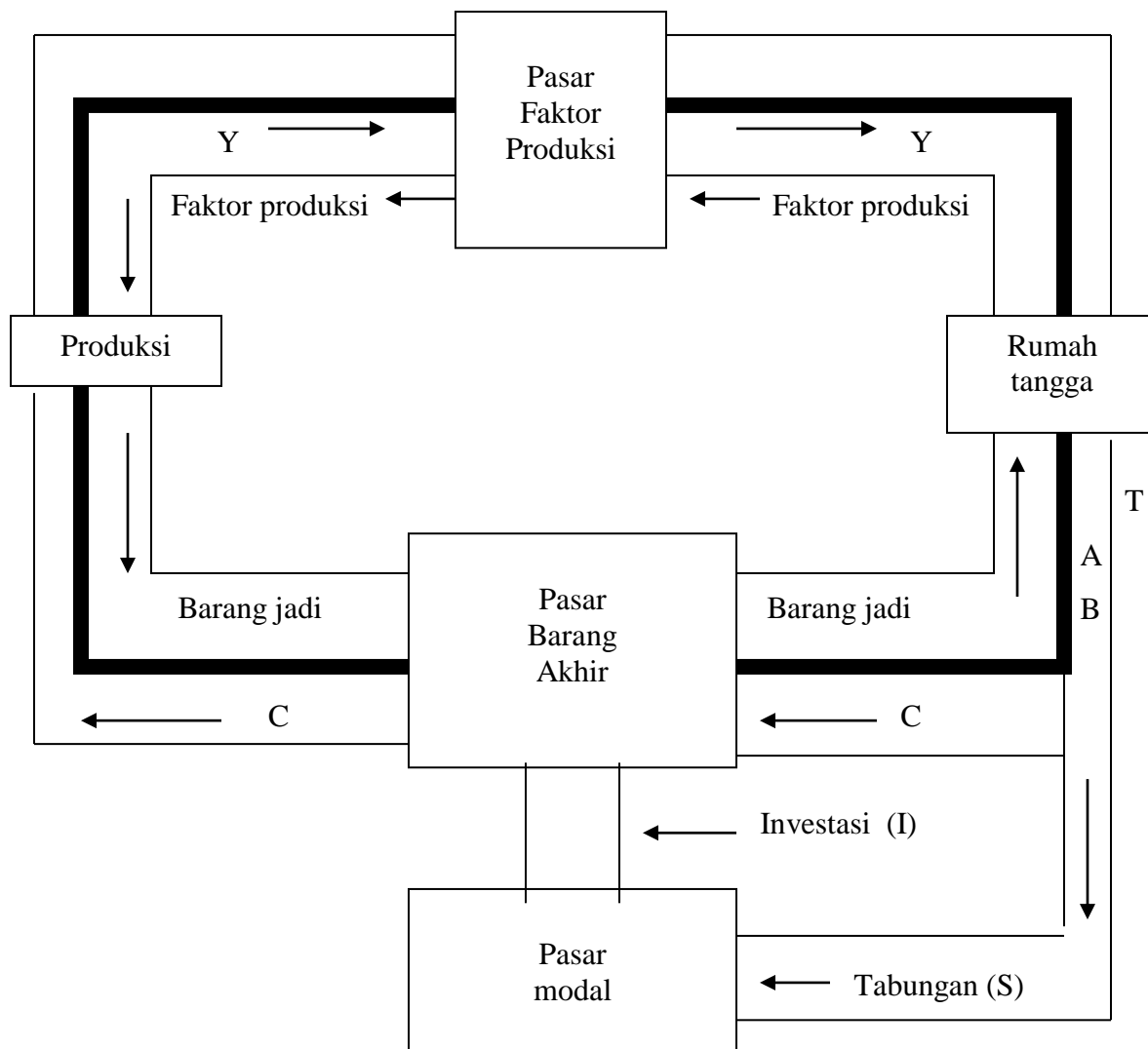
Apabila alternatif pertama yang diambil diharapkan konsumen membeli lebih banyak sehingga kelebihan produksi dapat terjual. Kadangkala produsen menderita penurunan keuntungan dengan penurunan harga tersebut. Karena keuntungan (devidend) termasuk di dalam pendapatan (Y), maka pendapatan akan mengalami penurunan.

Jika alternatif kedua (mengurangi produksi) yang dipilih, maka produsen akan mengurangi pembelian faktor produksi. Tindakan ini akan mengurangi pendapatan konsumen. Dengan demikian apakah tindakan yang pertama atau kedua, semuanya akan mengakibatkan penurunan pendapatan (Y).

Penurunan pendapatan akan berjalan terus sampai pendapatan (Y) = konsumsi (C), yakni tabungan (S) kembali sama dengan nol.

Dari analisis di atas nampaknya tabungan menyebabkan kontraksi kegiatan ekonomi. Dengan adanya lembaga keuangan (Bank misalnya) konsumen menabung uangnya di sana, yang kemudian oleh bank dipinjamkan kepada produsen untuk investasi. Pengertian investasi adalah pembelian barang modal, yakni barang yang dipakai untuk menghasilkan barang lain. Kenaikan investasi dapat mendorong kenaikan pendapatan. Apabila tabungan (S) merupakan kebocoran (leakage) dari aliran melingkar, maka investasi (I) merupakan injeksi ke dalam aliran melingkar. Peranan investasi dalam aliran melingkar dapat digambarkan dapat digambarkan sebagai berikut:

Diagram aliran melingkar dengan investasi



Keterangan:

- Y : Pendapatan atas pembayaran faktor produksi
- C : Pengeluaran Konsumsi

Injeksi dana investasi memungkinkan produsen menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak. Untuk itu dia akan membeli faktor produksi yang lebih banyak juga. Sebagai hasilnya pendapatan yang diterima oleh konsumen meningkat.

Kenaikan pendapatan konsumen tersebut akan mendorong mereka menambah konsumsi, tabungan atau keduanya. Posisi keseimbangan akan tercapai manakala besarnya injeksi (investasi) sama dengan kebocoran (tabungan)

Hubungan antara tabungan dan investasi adalah sebagai berikut:

1. Jika tabungan lebih besar dari pada investasi maka dampaknya akan menurunkan pendapatan.
2. Jika investasi lebih besar dari tabungan maka kegiatan ekonomi cenderung meningkat.
3. Keseimbangan ekonomi akan terjadi apabila tabungan sama dengan investasi.

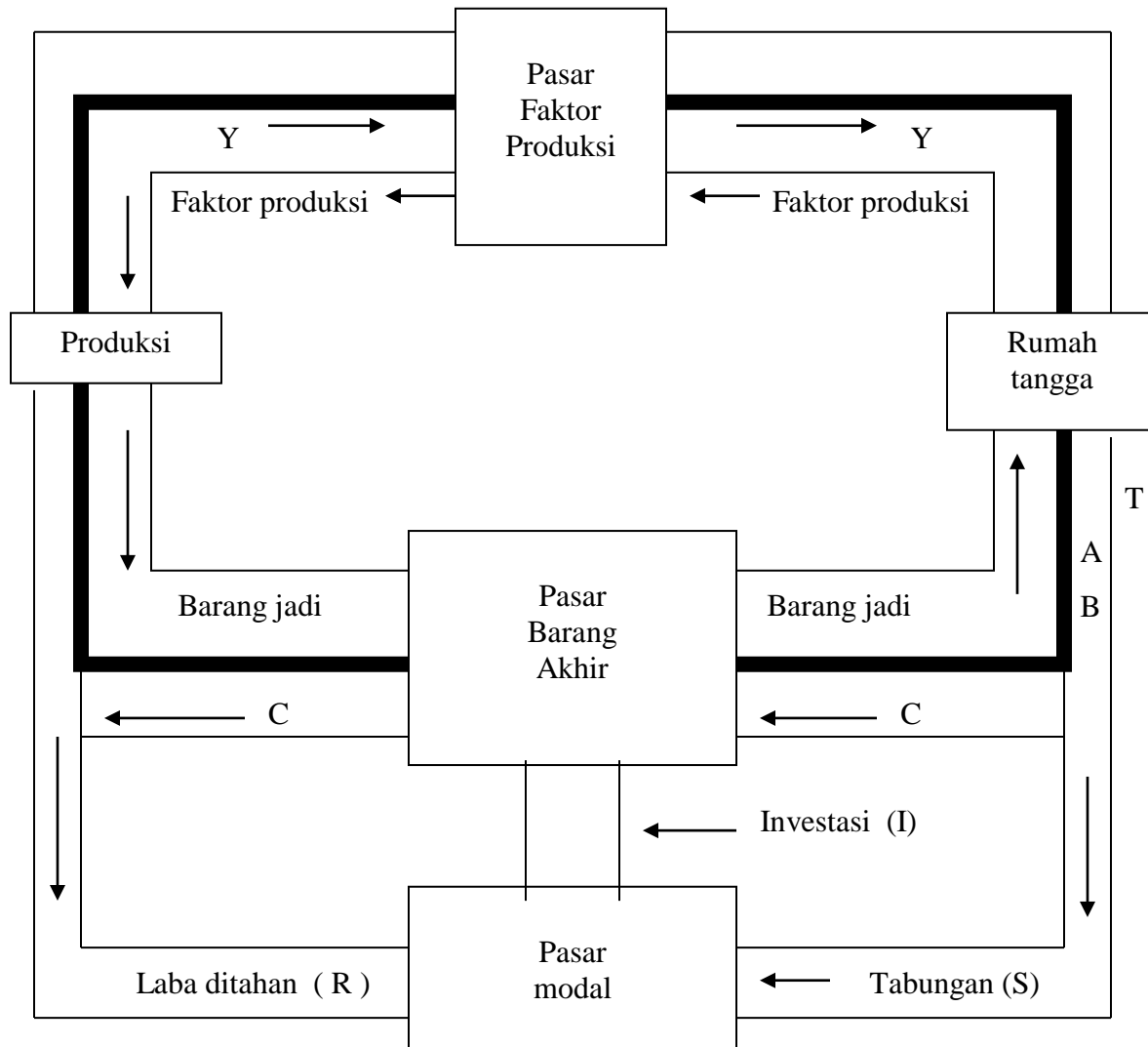
3. Peranan Laba Ditahan (Retained Earnings) dan Penyusutan (Depresiasi)

Produsen dalam hal membelanjakan atau menahan / menabung penerimaannya seperti halnya dengan konsumen, penerimaan yang ditahan oleh produsen berupa laba ditahan (retained earnings) yang semestinya dapat dibagikan kepada pemilik tetapi tidak dibagikan, hal ini merupakan bagian dari pendapatan atas penerimaan sebagai imbalan penyerahan faktor produksi yang berupa: upah, bunga, sewa dan laba.

Diagram melingkar dengan laba ditahan dan penyusutan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Diagram aliran melingkar dengan Laba ditahan dan penyusutan:



Keterangan:

- Y : Pendapatan
- C : Pengeluaran konsumen
- I : Investasi
- D : Penyusutan

Produsen juga menaruh uangnya ke dalam pasar uang / modal dengan cara menyisihkan (mencadangkan) untuk penyusutan seperti alat-alat, mesin dan barang modal lainnya yang mengalami kerusakan apabila dipakai. Dana yang disisihkan untuk mengganti mesin yang rusak disebut cadangan penyusutan.

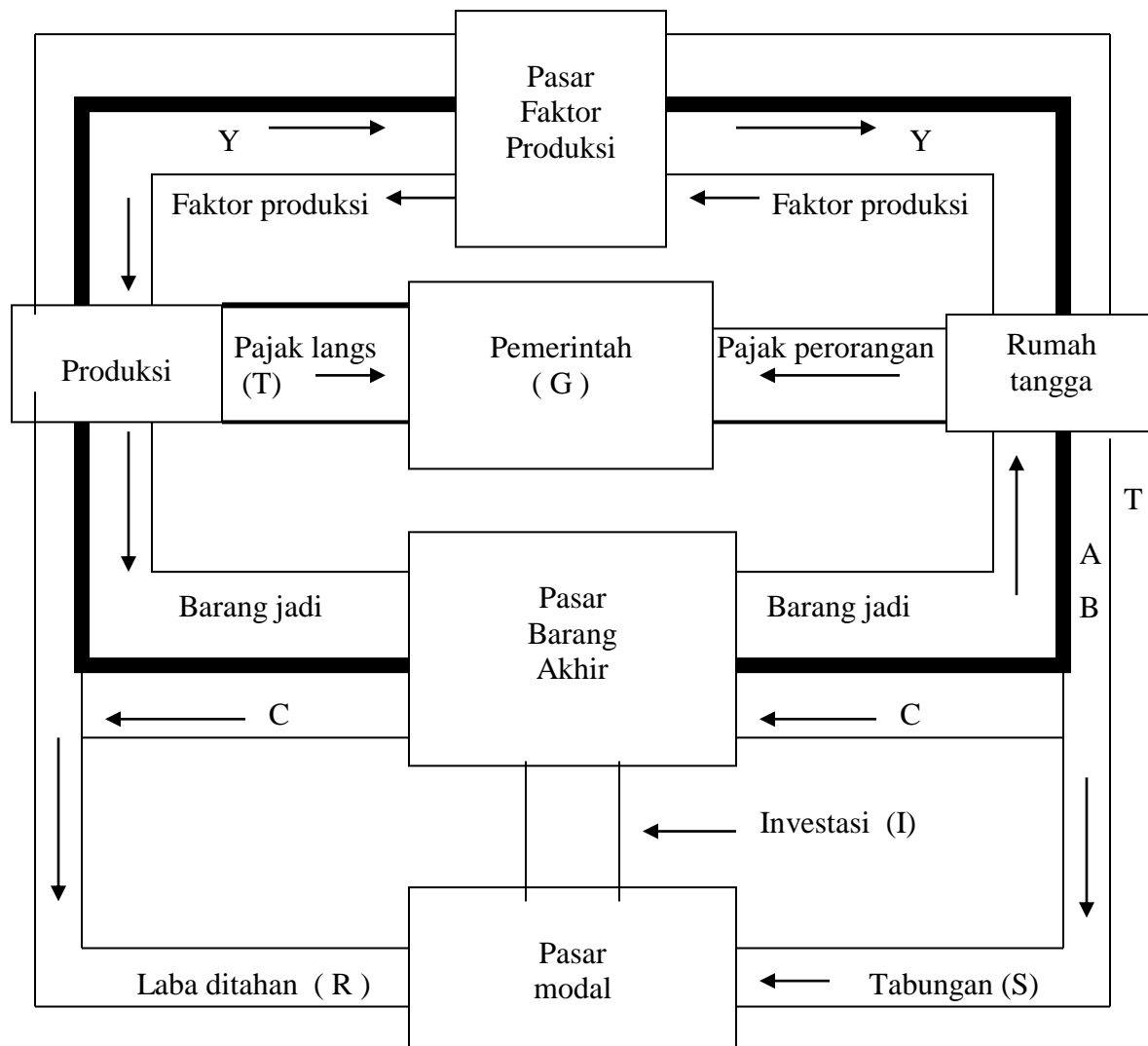
Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Penyusutan bukan merupakan bagian dari pendapatan karena bukan sebagai pembayaran penggunaan faktor produksi, tetapi sebagai pengeluaran produsen.

4. Peranan Pemerintah

Peranan pemerintah di dalam kegiatan ekonomi tercermin pada anggaran pendapatan dan belanja (budget) Pada dasarnya budget ini meliputi penerimaan (dari pajak) dan pengeluaran.

Peranan pemerintah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Bentuk apapun dari pajak akan mempunyai dampak menurunkan kegiatan ekonomi (depresi) karena merupakan kebocoran dari aliran kegiatan ekonomi.

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Contoh: pajak pendapatan konsumen. Pendapatan yang dapat dibelanjakan akan berkurang, demikian juga kemungkinan menabung juga akan semakin kecil. Konsekuensinya, pajak akan mengurangi permintaan barang dan jasa, dan produsen akan menyesuaikan apakah dengan menurunkan harga atau mengurangi produksi. Kedua tindakan ini akan mengurangi pendapatan (Y) yang diterima konsumen. Dengan demikian pajak mempunyai dampak depresi kegiatan ekonomi.

Pada dasarnya ada dua macam pajak, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung berupa pajak pendapatan perorangan atau badan (usaha) Pajak pendapatan merupakan pajak sebagai akibat dari adanya pendapatan (perorangan) atau laba (badan usaha) Uang yang untuk membayar pajak sudah mencakup dalam pendapatan (Y)

Pajak tidak langsung bukan diambil dari pendapatan pemilik faktor produksi, tetapi dari produk yang dihasilkan / dijual, seperti misalnya cukai rokok. Pajak ini dibayar oleh produsen sebagai biaya melakukan kegiatan bisnis

Biaya produksi total terdiri biaya faktor produksi (Y), penyusutan, (D), dan pajak perusahaan tidak langsung (T). Oleh karena itu produksi nasional kotor (GNP) = Y + D + T (penawaran agregat)

Pemerintah memungut pajak untuk membiayai pengeluarannya guna menyediakan jasa bagi masyarakat. Pengeluaran pemerintah terdiri dari:

- a. pembelian barang dan jasa
- b. Pembayaran transfer

Pembelian barang dan jasa, misalnya untuk membangun jalan, sekolah atau membayar gaji pegawai negeri. Pembelian barang dan jasa secara langsung mempengaruhi GNP.

Pembayaran transfer (transfer payments) bukan merupakan pembelian barang dan jasa tetapi merupakan semacam distribusi pajak yang terkumpul dari satu sumber kepada sumber lain.

Contohnya, adalah pembayaran untuk menunjang program kesejahteraan, seperti pensiun, tunjangan social dan sebagainya.

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Pembayaran ini merupakan distribusi pendapatan dari satu sumber / orang kepada sumber / orang lain. Dengan demikian pembayaran transfer bukan injeksi dan juga bukan kebocoran dalam aliran melingkar. Semata-mata hanya redistribusi pendapatan saja.

Untuk mendorong kegiatan ekonomi, menambah permintaan agregat pemerintah melakukan pembelian barang dan jasa. Dalam hal ini produsen akan melakukan 3 kemungkinan reaksi:

1. menaikkan harga
2. menaikkan produksi atau
3. keduanya.

Namun apabila faktor produksi telah digunakan sepenuhnya (full employment) dampak pengeluaran pemerintah akan menimbulkan inflasi.

Sebaliknya, apabila faktor produksi belum digunakan sepenuhnya (pengangguran) produksi dapat meningkat.

Permintaan agregat terdiri dari konsumsi (C), investasi swasta (I) dan pengeluaran pemerintah (G) GNP dapat pula dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran: $GNP = C + I + G$

5. Peranan Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan internasional meliputi:

- a. impor (M)
- b. ekspor (X)

Net ekspor (F) adalah selisih ekspor (dikurangi) impor ($F = X - M$)

Permintaan agregat kemudian menjadi $C + I + G + F$ dengan demikian GNP menurut pengeluaran: $GNP = C + I + G + F$

6. Ringkasan Injeksi dan Kebocoran

Secara ringkas dampak komponen-komponen pokok (injeksi dan kebocoran) terhadap kegiatan ekonomi.

Komponen aliran injeksi dalam kegiatan ekonomi antara lain:

1. investasi (I)

2. pengeluaran pemerintah (G)
3. ekspor (X)

Aliran yang merupakan kebocoran terdiri dari:

1. tabungan (S)
2. pajak (T)
3. impor (M)
4. dan laba ditahan (R)

Keadaan GNP dapat disesuaikan dengan mengatur injeksi dan kebocoran, apabila injeksi pengeluaran pemerintah (G) ditambah, maka GNP akan naik.

GNP akan naik atau turun tergantung dari seberapa lebar injeksi dan kebocoran dibuka.

POKOK BAHASAN

III. Produk Nasional Kotor (GROSS NATIONAL PRODUCT)

1. Definisi GNP.

Ada tiga pendekatan di dalam mengukur / menghitung besarnya GNP. Dari pasar barang dan jasa, GNP dapat dihitung atas dasar:

1. pengeluaran untuk membeli barang dan jasa tersebut.
2. nilai barang dan jasa akhir, dan
3. dari pasar faktor produksi dengan menjumlahkan penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi (upah + bunga + sewa + keuntungan)

Pengertian GNP adalah nilai (dalam uang) barang dan jasa *akhir* yang dihasilkan oleh satu negara (perekonomian) selama satu periode tertentu, biasanya satu tahun.

Ada 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pengertian / definisi Gross National Product (GNP) antara lain:

1. perlakuan terhadap produk yang dihasilkan oleh pemerintah. Biasanya produk tersebut tidak dipasarkan. Oleh karena itu penilaiannya didasarkan pada nilai / harga input yang dipergunakan untuk menghasilkannya. Misalnya seorang petugas perbaikan mobil di satu kantor pemerintah memperoleh hasil Rp 1.000,- per hari, dan membutuhkan waktu 1 1/2 jam untuk memperbaiki mobil, maka jasa yang dihasilkan oleh pemerintah sebesar Rp. 1.500,-
2. produk yang dihasilkan pada periode tersebut, tetapi tidak dipasarkan, melainkan disimpan dalam persediaan (inventory), tetap dihitung dalam GNP periode tersebut. Persediaan dianggap seolah-olah barang tersebut dibeli oleh perusahaan yang menghasilkannya.
3. barang-barang tertentu seperti mesin-mesin kadangkala tidak dijual untuk konsumen akhir, tetapi dibeli oleh produsen lain untuk menghasilkan produk lain. Kalau dikaitkan dengan definisi barang akhir, maka mesin tersebut tidak termasuk Akan tetapi investasi diartikan sebagai barang akhir yang dibeli oleh produsen untuk menghasilkan barang lain
4. produk yang dimasukkan ke dalam GNP tahun tertentu adalah produk yang dihasilkan pada tahun tersebut. Produk yang dihasilkan pada periode sebelumnya tidak tersebut.

2. Pendekatan Dalam Perhitungan GNP

a. Pendekatan Pengeluaran

GNP dapat dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran untuk membeli barang dan jasa akhir oleh konsumen (C), produsen (I) dan pemerintah (G); $GNP = C + I + G$

Pengertian I (investasi) adalah pengeluaran investasi oleh swasta untuk membeli barang-barang (mesin, rumah dan sebagainya) yang dihasilkan pada tahun tertentu. Tidak termasuk pertukaran barang-barang yang telah ada. Hal ini perlu dibedakan dengan pengertian investasi yang sering kita dengar, misalnya pembelian surat berharga di Bursa Efek, atau pembelian permata oleh orang kaya. Transaksi-transaksi ini hanyalah merupakan pertukaran dari satu bentuk kekayaan (uang) dengan bentuk kekayaan lain (surat berharga atau permata). Keduanya tidak termasuk dalam GNP.

Pengeluaran pemerintah (G) adalah pembelian barang dan jasa oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pembayaran gaji karyawan negeri termasuk dalam G. Tetapi pembayaran transfer, seperti pensiun, sumbangan sosial dan sebagainya yang tidak merupakan pembelian barang dan jasa tidak termasuk dalam G. Pembayaran transfer hanyalah redistribusi pendapatan saja dari seseorang (melalui pajak) kepada orang lain (penerima transfer)

Komponen pengeluaran terakhir adalah sektor luar negeri. Sektor luar negeri tercermin pada ekspor (X) dan impor (M) atau ekspor neto (F) yang terdiri (X - M). Di dalam pengeluaran (konsumsi misalnya) kadangkala termasuk penggunaan / pembelian barang dari luar negeri, demikian juga sebagian dari pengeluaran investasi (mesin dari luar negeri). Produk-produk yang digunakan yang berasal dari luar negeri tersebut bukan produksi dalam negeri. Oleh karena itu produk impor tersebut (M) haruslah dikurangkan dalam GNP.

Sebaliknya produk yang dihasilkan di dalam negeri kadangkala dibeli / digunakan oleh orang asing (ekspor), sehingga ekspor termasuk dalam GNP dan menambah. Dengan demikian GNP dengan pendekatan pengeluaran dapat dirumuskan sebagai:

$$GNP = C + I + G + (X - M)$$

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Satu konsep produk domestik kotor yang lain yang perlu mendapat perhatian adalah *Produk Domestik Kotor (gross domestic product)*. Perbedaan antara produk nasional kotor (GNP) dengan gross domestik product (GDP) adalah bahwa GDP menitik beratkan pada wilayah. Artinya, semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam wilayah Republik Indonesia (domestik) baik oleh penduduk Indonesia maupun asing termasuk di dalam GDP Indonesia, sedangkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia di luar negeri *tidak* masuk dalam GDP tetapi masuk dalam GNP. GNP meliputi semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk (warga negara) Indonesia.

b. Pendekatan Pendapatan

Cara kedua di dalam menghitung GNP adalah dengan menjumlahkan semua penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Dengan membeli faktor-faktor produksi, produsen menghasilkan barang yang kemudian dibagikan / dibayarkan untuk bahan, upah, sewa, bunga dan sisanya merupakan keuntungan.

$$\text{GNP} = \text{Upah} + \text{Bunga} + \text{Sewa} + \text{Keuntungan}$$

c. Pendekatan Produk/Nilai Tambah

Cara ketiga di dalam menghitung GNP adalah dengan menjumlahkan nilai tambah (value added) dari setiap kegiatan produksi. Nilai tambah kegiatan produksi adalah pendapatan penjualan dikurangi dengan pembayaran (nilai) barang antara (barang yang dibeli dari perusahaan lain)

3. Ukuran Lain Untuk Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional merupakan suatu pengertian yang cukup kompleks dan mengandung 5 konsep pengertian tentang pendapatan antara lain:

a. Produksi Nasional Kotor (Gross National Product = GNP)

Yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat selama 1 tahun, yang dinilai menurut harga pasar berlaku.

Barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat, dapat dibedakan atas:

1. barang-barang konsumsi baik barang jadi maupun barang setengah jadi.
2. barang-barang modal atau barang investasi.

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

b. Produk Nasional Neto/bersih (Net National Product=NNP)

NNP diperoleh dari GNP setelah dikurangi penyusutan dan biaya pengganti barang-barang modal

c. Pendapatan Nasional Bersih / Net (Net National Income = NNI)

Net Nasional Income (NNI) diperoleh dari Net National Product dikurangi pajak tidak langsung.

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: pajak penjualan, tontonan dan lain-lain.

d. Pendapatan Perseorangan (Personal Income)

Personal Income ini dapat diperhitungkan dari NNI sesudah dikurangi :

1. Iuran Pensiun: iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dari setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut mencapai umur tertentu dan tidak lagi bekerja pada perusahaan itu.
2. Laba yang tidak dibagi (laba ditahan): adalah sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan, untuk tujuan tertentu misalnya: untuk keperluan-keperluan perusahaan atau untuk menutup kerugian.
3. Pajak Perseroan yaitu pajak yang harus dibayar oleh setiap Badan Usaha kepada pemerintah.

Untuk menghitung Personal Income selanjutnya ditambah dengan transfer payment.

Jadi:

“ $PI = NNI - (\text{pajak perseroan} + \text{laba yang tidak dibagi} + \text{jaminan social}) + \text{transfer payment}$ ”

Yang dimaksud dengan transfer payment adalah pembayaran-pembayaran dari negara yang dibayarkan kepada orang-orang tertentu, tanpa balas jasa, misalnya pensiun, tunjangan para veteran, tunjangan penganggur dan lain-lain.

e. **Disposable Income (Pendapatan Perseorangan Neto)**

Adalah pendapatan yang siap dimanfaatkan untuk konsumsi dan ditabung. Disposable Income diperoleh dari Personal Income dikurangi dengan pajak langsung / penghasilan.

Pajak langsung ialah pajak yang bebannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Dari penjelasan diatas dapat disederhanakan sebagai berikut:

1. Gross National Product (GNP) terdiri atas:
 - a. Upah dan gaji
 - b. Penghasilan Perusahaan Perseorangan
 - c. Sewa rumah, tanah
 - d. Bunga
 - e. Devident
 - f. Keuntungan perusahaan yang tidak dibagi
 - g. Pajak Perusahaan
 - h. Pajak tidak langsung
 - i. Penyusutan
2. Net National Product (NNP)
GNP - Depreciation
3. Net National Income (NNI)
NNP – pajak tidak langsung
4. Personal Income
NNI – (pajak perseroan+laba ditahan+iuran jaminan social)+transfer payment
5. Disposable Income
Personal Income – pajak langsung / pajak Penghasilan (PPh)

Contoh:

GNP	: Rp 90.000.000,-	Pernyusutan	Rp 1.000.000,-
Pajak tidak langsung	: Rp 500.000,-	Pajak perseroan	Rp 1.500.000,-
Laba ditahan	: Rp 8.000.000,-	Iuran jaminan sosial	Rp 3.000.000,-
Transfer payment	: Rp 2.000.000,-	Pajak langsung	Rp 3.000.000,-

Ditanya:

- a. NNP b. NNI c. PI d. DI

Jawab:

GNP	: Rp 90.000.000,-
Penyusutan	: <u>Rp 1.000.000,-</u> (-)
NNP	: Rp 89.000.000,-
Pajak tidak langsung	: <u>Rp 500.000,-</u> (-)
NNI	: Rp 88.500.000,-
Pajak Perseroan	Rp 1.500.000,-
Laba ditahan	Rp 8.000.000,-

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroellah

Jaminan social	<u>Rp 3.000.000,-</u> (+)	
		: <u>Rp 12.500.000,-</u> (-)
		: Rp 76.000.000,-
Transfer payment		: <u>Rp 2.000.000,-</u> (+)
Personal Income		: Rp 78.000.000,-
Pajak langsung		: <u>Rp 3.000.000,-</u> (-)
Disposable Income		: Rp 75.000.000,-

4. Kelemahan GNP Sebagai ukuran Kesejahteraan

Beberapa kelemahan penggunaan GNP untuk mengukur kesejahteraan suatu bangsa:

1. Hanya produk yang masuk pasar yang dihitung di dalam GNP. Produk yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri, seperti yang banyak terdapat di desa di negara berkembang tidak tercakup dalam GNP, padahal produk ini mempengaruhi kesejahteraan mereka. Ibu-ibu rumah tangga yang mengerjakan sendiri pekerjaannya, petani yang menghasilkan kelapa atau sayuran yang dikonsumsi sendiri adalah beberapa contoh barang dan jasa yang tidak masuk pasar sehingga tidak dihitung dalam GNP.
2. GNP tidak menghitung nilai waktu istirahat (leisure time), padahal ini sangat besar dalam kesejahteraan.
Makin kaya seseorang akan semakin menginginkan waktu istirahat. Beberapa negara maju mulai memikirkan waktu kerja yang lebih pendek. Ini berarti akan terdapat perbedaan (gap) yang semakin besar antara besarnya GNP dengan kesejahteraan, GNP cenderung nilainya lebih rendah dari kesejahteraan.
3. Kejadian yang jelek maupun baik dihitung dalam GNP. Seperti misalnya, bencana alam, jelas merupakan kejadian yang tidak diinginkan dan menurunkan kesejahteraan karena banyak orang meninggal. Untuk mengatasi beban penderitaan. Pemerintah membangun kembali rumah-rumah, jalan, sekolah. Beberapa pihak swasta ikut membangun. Dilihat dari sisi GNP akan menaikkan karena jalan atau jembatan yang oleh Pemerintah dihitung dalam G (pengeluaran pemerintah) dan yang oleh swasta masuk I (investasi). Dengan demikian pemakaian ukuran GNP untuk kesejahteraan kurang tepat.

4. Masalah polusi sering tidak diperhitungkan dalam GNP. Banyak industri yang di dalam produksinya menimbulkan polusi air atau udara hal ini tentu saja merusak lingkungan (banyak warga masyarakat yang sakit karenanya) Mereka terpaksa keluar biaya untuk berobat atau tidak pergi bekerja (merupakan social cost) Polusi yang menimbulkan biaya social tersebut akan mengurangi kesejahteraan, tetapi tidak diperhitungkan dalam GNP. Yang diperhitungkan hanyalah kenaikan produksi saja. Oleh karena itu penggunaan GNP untuk mengukur kesejahteraan suatu bangsa kurang tepat.

5. Tujuan dan Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional perlu dihitung untuk berbagai maksud dan tujuan antara lain untuk:

- a. Mengukur tingkat kemakmuran.

Dengan jalan menghitung pendapatan nasional suatu negara, sebetulnya kita dapat pula mengukur tingkat kemakmuran negara tersebut. Karena dalam perhitungan pendapatan nasional akan dihitung semua sumber yang mendatangkan hasil baik barang maupun jasa selama 1 tahun.

Semakin tinggi nilai pendapatan nasional, maka semakin tinggi kemakmuran negara, begitu juga sebaliknya.

- b. Mengetahui struktur perekonomian

Dengan perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui golongan perekonomian dari suatu negara yaitu agraris atau industri. Selanjutnya dapat diteliti susunan sektor-sektor lapangan usaha perekonomiannya, seperti sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor industri. Kalau pendapatan nasional lebih dominan dari sektor agraris, maka struktur perekonomiannya agraris. Kalau yang lebih dominan sektor industri, maka struktur perekonomiannya industri.

- c. Mengetahui pertumbuhan perekonomian

Perhitungan pendapatan nasional dilakukan setiap tahun, maka dapat diadakan perbandingan dari tahun ke tahun. Dengan demikian dapat diketahui kenaikan atau penurunan kemakmuran, perubahan struktur perekonomian, kenaikan atau penurunan pendapatan per jiwa dihubungkan dengan jumlah penduduk.

- d. Membandingkan perekonomian antar daerah dan antar negara.

Di samping pendapatan nasional untuk seluruh negara, dapat dihitung pendapatan untuk provinsi yang disebut pendapatan regional; dengan demikian dapat diketahui struktur perekonomian setiap daerah dan dapat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Sedangkan pendapatan nasional suatu negara juga dapat dibandingkan dengan negara lain untuk mengetahui apakah negara tersebut tergolong negara yang sudah maju, sedang berkembang atau masih terbelakang.

- e. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah.

Jika dikehendaki pertumbuhan pendapatan nasional dengan tingkat tertentu, maka tingkat pertumbuhan harus dialokasikan pada sektor-sektor lapangan usaha yang merupakan komponen dari pendapatan nasional itu sendiri. Dengan demikian kegiatan sektor-sektor tersebut dapat terarah dan seimbang sesuai tujuan yang dikehendaki.

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komponen Pendapatan Nasional.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi komponen pendapatan nasional sebagai berikut:

1. Permintaan dan Penawaran Agregat (keseluruhan)

Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan jumlah barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga.

Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu.

Penawaran agregat dapat didefinisikan sebagai berikut: daftar dari keseluruhan jumlah barang-barang dan jasa yang ingin ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga.

Apabila terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output, yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran.

Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output dan akan menambah pengangguran

2. Konsumsi dan Tabungan.

Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun)

Sedangkan tabungan (*saving*) adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat sekali hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang kita kenal dengan *psychological law of consumption* yang membahas tingkah laku masyarakat mengenai konsumsi bilamana dihubungkan dengan pendapatan.

Bunyi hukum tersebut adalah:

- a. Jika pendapatan naik, maka konsumsi pun akan naik, tetapi tidak sebanyak kenaikan pendapatan.
- b. Setiap kenaikan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi dan *saving* (tabungan).
- c. Setiap kenaikan pendapatan jarang menurunkan konsumsi dan *saving*

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi masyarakat sebagai berikut:

1. Perkiraan dan dugaan-dugaan masa depan.

Pengeluaran konsumsi masyarakat akan terpengaruh oleh dugaan masa depan. Jika harga barang diperkirakan akan naik di waktu yang akan datang, maka konsumsi akan meningkat. Sebaliknya masyarakat akan mengurangi konsumsi bila diperkirakan harga akan turun di masa yang akan datang.

2. Distribusi pendapatan.

Bila sebagian besar pendapatan nasional dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat, maka hasrat konsumsi rata-rata masyarakat menjadi rendah. Sebaliknya apabila pembagian pendapatan masyarakat merata, maka hasrat konsumsi rata-rata menjadi tinggi.

3. Jumlah barang yang telah dimiliki

Jika konsumen telah memiliki sejumlah besar barang-barang, maka keinginan untuk menambah konsumen untuk mengkonsumsi akan berkurang karena sudah merasa

jenuh, tetapi sebaliknya apabila keadaan ekonomi sulit, hasrat konsumsi cenderung tinggi.

4. Pajak

Jika terjadi perubahan pada struktur pajak, misalnya perubahan sifat dan besarnya pajak, akan berpengaruh terhadap konsumsi. Pajak yang bersifat progresif akan menaikkan konsumsi, karena kelompok yang berpenghasilan rendah cenderung menambah konsumsinya.

5. Sikap dan kebiasaan berhemat.

Sikap kebiasaan berhemat akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Semakin hemat masyarakat, maka MPC-nya semakin rendah, sedangkan MPS-nya meningkat.

3. Investasi

Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat (keseluruhan). Dalam uraian selanjutnya akan kita pelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha untuk melakukan investasi yaitu:

a. *Perubahan perkembangan teknologi.*

Teknologi modern dapat menghemat biaya dan sekaligus akan mempertinggi produktivitas sehingga keuntungan meningkat yang sekaligus akan menggerakkan pengusaha untuk meningkatkan investasi.

b. *Stok barang modal yang dimiliki*

Pengusaha yang banyak memiliki stok barang modal tidak akan bernafsu menambah barang modal sehingga investasi tidak akan menggebu-gebu. Sebaliknya jika tidak memiliki stok barang modal pengusaha akan melakukan investasi untuk membeli barang-barang modal

c. *Pajak Perseroan.*

Jika pemerintah menaikkan pajak perseroan, mengakibatkan keuntungan berkurang sehingga investasi sulit dilakukan dan demikian sebaliknya.

d. *Tingkat bunga bank*

Bunga bank sangat mempengaruhi tingkat investasi, dan investasi akan meningkat apabila bunga bank rendah, dan investasi akan menurun jika bunga bank tinggi

e. *Biaya-biaya pengadaan, pemeliharaan dan operasi*

Jika biaya-biaya di atas relatif lebih rendah dari keuntungan bersih yang diperoleh pengusaha, maka investasi akan ditingkatkan dan demikian sebaliknya.

f. Perkiraan atau ramalan masa depan

Pengusaha selalu membuat ramalan atau perkiraan untuk masa depan atas investasi yang dilakukannya. Jika diperkirakan investasi yang dilakukan akan memberi keuntungan yang cukup besar, maka investasi akan ditingkatkan dan demikian sebaliknya.

POKOK BAHASAN

IV. Keseimbangan Pendapatan Nasional (Teori Keynes)

1. Pendahuluan.

Keynes menyatakan bahwa mekanisme pasar *tidak* dapat secara otomatis menjamin adanya full employment dalam perekonomian. Dia menyarankan adanya peranan / campur tangan pemerintah dalam perekonomian (khususnya investasi yang lebih besar).

Kapitalisme katanya, dalam banyak hal sangat memberatkan. Namun, apabila diatur dengan bijaksana dapat membuat lebih efisien dalam mencapai tujuan ekonomi masyarakat. Dia yakin bahwa campur tangan pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah depresiasi dan stagnasi ekonomi yang terjadi pada saat itu.

Dalam kaitannya dengan ekonomi moneter, Keynes menyumbangkan pemikirannya antara lain:

Pertama, buku yang berjudul: “a Tract on Monetary Reform: (1923) yang mengemukakan pentingnya kebijaksanaan stabilitas harga. Perubahan harga mempunyai efek yang berbeda terhadap tiga golongan utama penduduk, yakni: investor (yang menginvestasikan tabungan), pengusaha / entrepreneur dan penerima upah. Secara umum, inflasi akan menyulitkan golongan penduduk pertama dan deflasi akan menyulitkan golongan kedua dan ketiga.

Kebijaksanaan stabilitas harga diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang timbul dari inflasi maupun deflasi. Stabilisasi tidak dapat dilakukan dalam system moneter yang berlaku pada saat itu (system standar emas) Kedua, adalah tulisannya yang berjudul: “A Treatise on Money” (1930) Buku ini disebut Treatise sebab terdiri dari beberapa topik, seperti misalnya: banking, standar emas, pertukaran internasional dan bank sentral. Kesemuanya ini sebenarnya ingin menerangkan sebab-sebab terjadinya ketidakstabilan dalam perekonomian. Sedangkan Wicksell dalam hal ini menyatakan bahwa ada dua tingkat bunga, yakni the natural rate dan market rate. Apabila penguasa moneter menetapkan *market rate* lebih rendah dari *natural rate*, pengusaha akan melihat bahwa investasi akan menguntungkan dan mereka akan meminjam uang sehingga mengakibatkan investasi meningkat, harga akan naik (tanpa batas)

Sebaliknya, apabila *market rate* lebih tinggi daripada *natural rate*, pengusaha tidak akan melakukan investasi dan harga akan turun

Pendekatan Robertson tentang tabungan dan investasi sedikit berbeda. Tabungan tidak selalu sama dengan investasi, dan tidak ada mekanisme otomatis yang membuat keduanya sama.

Tidak hanya investasi sangat penting dalam menentukan pendapatan nasional, tetapi terdapat kemungkinan bahwa tabungan lebih besar daripada investasi. Keynes menyatakan bahwa tingkat bunga tidaklah merupakan media untuk menyamakan keduanya. Tugas utama bank sentral adalah menciptakan kestabilan harga melalui kebijaksanaan tingkat bunga yang selayaknya.

2. Keseimbangan Pendapatan Nasional

Menurut kaum klasik, pendapatan nasional akan selalu dalam keadaan full employment dimana *keinginan* masyarakat untuk menabung sama dengan *keinginan* perusahaan untuk melakukan investasi (dalam arti *ex ante*) Dalam kenyataannya (*ex post*) tabungan selalu sama dengan investasi. Akan tetapi kenyataannya bahwa tabungan sama dengan investasi bukanlah merupakan syarat adanya keseimbangan dalam pendapatan nasional yang selalu dalam keadaan full employment.

Keynes membantah keadaan ini dan menyatakan bahwa pendapatan nasional yang seimbang dapat terjadi pada keadaan kurang dari full employment.

Perbedaan pendapat ini secara sederhana dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut. Misalnya, sektor perusahaan menghasilkan output sebesar Rp 1. Milyad (Y) dalam keadaan full employment dan mengharapkan dapat menjual Rp 800. juta kepada sektor rumah tangga (C) dan ingin menggunakan sisanya yang sebesar Rp 200 juta untuk investasi (persediaan termasuk dalam pengertian investasi) Mereka akan tetap menghasilkan sejumlah itu sepanjang keinginan untuk menjual terealisasi.

Jika konsumen (rumah tangga) merencanakan membeli sebesar Rp 800 juta (dengan demikian keinginan untuk menabung sebesar Rp 200 juta) maka apa yang diinginkan oleh sektor perusahaan persis sama dengan yang diinginkan oleh konsumen. Tetapi, apabila konsumen memutuskan hanya akan membelanjakan sebesar Rp 700 juta (berarti keinginan menabung sebesar Rp 300 juta) maka keinginan kedua pihak tidak sama. Apa

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

yang terjadi ? Di sinilah (dalam menjawab pertanyaan tersebut) letak perbedaan antara kaum klasik dan Keynes.

Dalam kasus di atas, sektor perusahaan akan mengalami tambahan persediaan yang *tidak dikehendaki* (unintended inventory) sebesar Rp 100 juta. Total persediaan (kenyataan) menjadi sebesar Rp 300 juta (dalam mana yang sebesar Rp 100 juta tak dikehendaki) sama dengan total tabungan Rp 300 juta (semuanya diinginkan konsumen) Dalam hal ini keinginan menabung konsumen (Rp 300 juta) lebih besar daripada keinginan investasi sektor perusahaan (Rp 200 juta)

Menurut klasik, akibat dari keadaan ini (keinginan menabung lebih besar daripada keinginan investasi) akan terjadi perubahan harga. Karena sektor perusahaan tidak bisa menjual output yang direncanakan (adanya persediaan tak diinginkan sebesar Rp 100 juta) maka perusahaan akan melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Menurunkan harga outputnya sampai semua persediaan yang tak diinginkan tersebut terjual habis.
2. Buruh akan menurunkan tuntutan upahnya (daripada menganggur)
3. Tingkat bunga juga akan turun karena keinginan menabung lebih besar daripada keinginan investasi.

Turunnya tingkat bunga ini akan menurunkan keinginan menabung (dus menambah keinginan untuk membeli barang) dan mendorong untuk melakukan investasi sampai keinginan menabung kembali sama dengan keinginan investasi dan sektor perusahaan kembali pada produksi full employment.

Keynes mengajukan penyelesaian yang berbeda. Harga barang relatif tetap dan mungkin tidak turun meskipun terdapat kelebihan persediaan barang.

Demikian pula upah, sangat sukar untuk turun, mungkin karena adanya tantangan dari serikat buruh, dan yang lebih penting lagi, bahwa tingkat bunga tidaklah dapat menyamakan tabungan dengan investasi. Tingkat bunga ditentukan di dalam pasar uang, yang membuat permintaan akan uang sama dengan penawarannya.

Menurut Keynes, apabila sektor perusahaan mengalami tambahan persediaan yang tidak diinginkan, perusahaan akan memperkecil / mengurangi produksi. Output akan turun selama keinginan menabung lebih besar daripada keinginan untuk investasi (dus, ada persediaan yang tidak diinginkan) Proses turunnya output itu akan terus

Diktat Pengantar Ekonomi Makro

Oleh: R.Agoes Kamaroella

berlangsung sampai keinginan menabung sama dengan keinginan investasi, dalam mana pendapatan nasional keseimbangan yang baru lebih rendah dari semula.

POKOK BAHASAN

V. Konsep Keseimbangan Pendapatan Nasional

Konsumsi dan Penentuan Pendapatan Nasional (GNP)

Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi (C) terutama tergantung dari pendapatan (Y), makin tinggi pendapatan makin tinggi konsumsi

Keinginan untuk melakukan konsumsi (Marginal propensity to consume) yang menunjukkan perubahan konsumsi per unit dan perubahan pendapatan = $MPC = \Delta C / \Delta Y$ yang besarnya kurang dari 1. Misalnya, $b = 0,6$ berarti bahwa kenaikan pendapatan sebesar Rp.1.000,- akan menambah pengeluaran konsumsi sebesar Rp 600,-(yang berarti pula penambahan tabungan sebesar Rp 400,-)

Keinginan untuk melakukan menabung (Marginal propensity to save) yakni tambahan tabungan yang diakibatkan oleh adanya tambahan pendapatan $MPS = \Delta S / \Delta Y$

3. Perubahan Pendapatan Nasional

Apakah Y ekuilibrium akan bertahan lama ? Jawabannya ya, apabila tidak ada perubahan fungsi konsumsi (dan dengan demikian juga fungsi tabungan) dan fungsi investasi. Kalau bisa bertahan lama, apakah hal ini menunjukkan suatu keadaan yang baik ? ya, apabila Y ekuilibrium berada dalam keadaan full employment.

Tetapi Keynes tidak memberikan jaminan bahwa Y ekuilibrium mesti dalam full employment. Keadaan ini mungkin terjadi, tetapi hanya karena kebetulan saja, bukan secara otomatis. Alasannya, pengeluaran investasi sifatnya tidak stabil. Pengusaha akan memperkecil pengeluaran investasinya manakala harapannya untuk menjual outputnya kecil. Akibatnya, keinginan untuk melakukan investasi turun dan dengan sendirinya pendapatan nasional juga turun.

Perubahan di dalam pengeluaran (C dan I) akan menyebabkan perubahan dan GNP. Perubahan dalam pengeluaran dalam arti perubahan yang sifatnya autonomous (independent atau tidak tergantung daripada GNP) Tetapi, dalam proses multiplier bahwa perubahan pengeluaran yang sifatnya autonomous selanjutnya mengakibatkan adanya perubahan pengeluaran yang disebut dengan induced (yang dalam contoh proses

multiplier berupa perubahan pengeluaran konsumsi) Makin besar MPC, makin besar pula perubahan GNP.

Keynes membagi sifat pengeluaran kedalam autonomous dan induced. Dia berkeyakinan bahwa pada dasarnya **pengeluaran konsumsi itu sifatnya induced (tergantung dari pendapatan) sedang pengeluaran investasi sifatnya autonomous (tidak tergantung dari pendapatan, tetapi tergantung pada tingkat bunga dan keuntungan yang diharapkan)**

Menurut Keynes, masalah utama dalam ekonomi makro adalah bahwa perubahan dalam pengeluaran yang sifatnya autonomous akan menyebabkan terjadinya fluktuasi dalam kegiatan ekonomi melalui proses multiplier. Perubahan GNP akan mengakibatkan terjadinya unemployment, apabila pengeluaran autonomous turun dibawah tingkat full employment GNP. **Sebaliknya** akan terjadi inflasi apabila pengeluaran autonomous naik sedangkan GNP sudah ada pada keadaan full employment.

Dalam hal ini resep yang diajukan kaum klasik adalah **tidak berbuat apa-apa (do nothing – laissez faire)** dalam jangka panjang akan tercapai full employment dan sekaligus ekuilibrium.

Keynes resepnya **do something (campur tangan pemerintah)** dalam jangka pendek. Sebab katanya: “ dalam jangka panjang kita ini senua mati” (in the long run we are all dead) oleh sebab itu, analisis ekonomi makro Keynes lebih menitikberatkan pada analisis jangka pendek.

Untuk menghitung berapa besar pertambahan pendapatan nasional (ΔY) dari pertambahan investasi yang dilakukan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta Y = k \cdot \Delta I$$

Dimana :

ΔY adalah tambahan pendapatan nasional

k adalah koefisien multiplier

ΔI adalah tambahan investasi

Sedangkan untuk menentukan koefisien multiplier untuk negara yang menganut system ekonomi terbuka / mengadakan hubungan dengan luar negeri / ekspor dan import, dapat dipergunakan rumus sebagai berikut:

$$k = \frac{1}{\{1 - (MPC - MPM)\}}$$

Dimana :

k : koefisien multiplier

MPC : hasrat tambahan untuk konsumsi (Marginal propensity to consume) $= \frac{\Delta C}{\Delta Y}$

MPM : hasrat tambahan untuk import (Marginal propensity to import) $= \frac{\Delta M}{\Delta Y}$

Contoh : MPC = 0,90 MPM = 0,15

$\Delta I = 800$ trilyun

Berapakah tambahan pendapatan nasional yang diharapkan (ΔY) ?

Jawab : MPC = 0,90 MPM = 0,15

$\Delta I = 800$ trilyun

$$\begin{aligned} k &= \frac{1}{\{1 - (MPC - MPM)\}} \\ &= \frac{1}{1 - (0,90 - 0,15)} \\ &= \frac{1}{1 - 0,75} = \frac{1}{0,25} = 4 \end{aligned}$$

Jadi tambahan pendapatan nasional yang diharapkan (ΔY)

$$\Delta Y = k \cdot \Delta I$$

$$1. \times 800 \text{ trilyun}$$

$$= 3.200 \text{ trilyun}$$

4. Peranan Pemerintah

Apabila pengeluaran investasi swasta tidak cukup mendorong kenaikan GNP (dengan sendirinya juga tidak cukup menciptakan kesempatan kerja) maka pengeluaran pemerintah dapat menggantikannya.

Menambahkan pengeluaran pemerintah serta pajak, tidaklah mengalami kesulitan. Dimana pengeluaran sekarang meliputi pengeluaran konsumsi, (C), investasi (I) dan pemerintah (G)

Apabila Y_0 adalah tingkat pendapatan pada keadaan full employment, maka adanya G akan menimbulkan gejala inflasi (inflationary gap) Oleh karena itu, pemerintah biasanya membelanjai pengeluarannya melalui perpajakan. Pajak tidak secara langsung mempengaruhi pengeluaran (tidak seperti I atau G) tetapi akan mempengaruhi pendapatan konsumen yang siap untuk dibelanjakan (disposable income) yang didefinisikan sebagai GNP dikurangi pajak (T) Sehingga fungsi konsumsi setelah adanya pajak menjadi :

$$C = a + b (Y - T) \text{ atau}$$

$$C = a + bY - b T$$

Dari persamaan terakhir jelas bahwa apabila (T) naik dengan Rp 10 juta, konsumsi turun dengan $b \times$ Rp 10 juta (jika $b = 0,6$ maka konsumsi turun dengan Rp 6 juta) Alasannya, setiap rupiah pajak yang diambil oleh pemerintah dianggap oleh konsumen sama seperti turunnya pendapatan sebesar satu rupiah juga.

Mereka mengurangi konsumsi sebesar MPC dikalikan dengan besarnya pajak ($-bT$)

Turunnya konsumsi sebagai akibat pajak, akan berakibat turunnya pendapatan nasional. (Ingat C adalah bagian dari Y, sehingga apabila Y turun maka C juga turun) Secara matematik sederhana besarnya multiplier G dan T dapat ditunjukkan sebagai berikut:

a. Keadaan keseimbangan:

$$Y = C + I + G$$

b. Fungsi konsumsi

$$C = a + b Y_d \quad \text{dimana } Y_d \text{ adalah disposable income yang besarnya} = Y - T$$

Persamaan (b) di atas kemudian dapat dituliskan:

$$C = a + b (Y - T)$$

c. Fungsi pajak:

$$T = T_0 + t Y \quad \text{dimana } T_0 \text{ adalah pajak tetap, dan } t \text{ adalah tarif pajak.}$$

d. Investasi (I) dan pengeluaran pemerintah (G) dianggap tetap (autonomous)

e. Dengan substitusi diperoleh:

$$C = a + b Y_d$$

$$C = a + b (Y - T)$$

$$C = a + b (Y - T_0 - t Y)$$

$$C = a - b T_0 + b (1 - t) Y$$

Perubahan T_0 akan menggeser garis C, sedang perubahan t akan mengubah lereng garis C

f. Selanjutnya, masukkan persamaan terakhir ini, ke dalam persamaan (a) diperoleh:

$$Y = C + I + G$$

$$Y = a - b T_0 + b (1 - t) Y + I + G$$

$$(1 - b (1 - t)) Y = a - b T_0 + I + G$$

$$Y = \frac{a - b T_0 + I + G}{1 - b (1 - t)}$$

Persamaan terakhir ini menunjukkan bahwa G mempunyai multiplier seperti I dan a (konsumsi autonomous) yakni sebesar:

$$\text{Multiplier G, I atau a} = \frac{1}{1 - b (1 - t)}$$

Demikian juga, dapat diketahui besarnya multiplier pajak (T) yakni sebesar:

$$\text{Multiplier T} = \frac{-b}{1 - b (1 - t)}$$

POKOK BAHASAN

VI.Pasar Uang dan Tingkat Bunga.

Menurut kaum klasik tingkat bunga itu merupakan hasil interaksi antara tabungan (S) dan investasi (I) dan uang hanyalah mempengaruhi harga barang (teori kuantitas uang)

Tetapi Keynes mempunyai pandangan yang berbeda, yang menyatakan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang (ditentukan dalam pasar uang). Dimana uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi (GNP) sepanjang uang ini mempengaruhi tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi dan dengan demikian akan mempengaruhi GNP

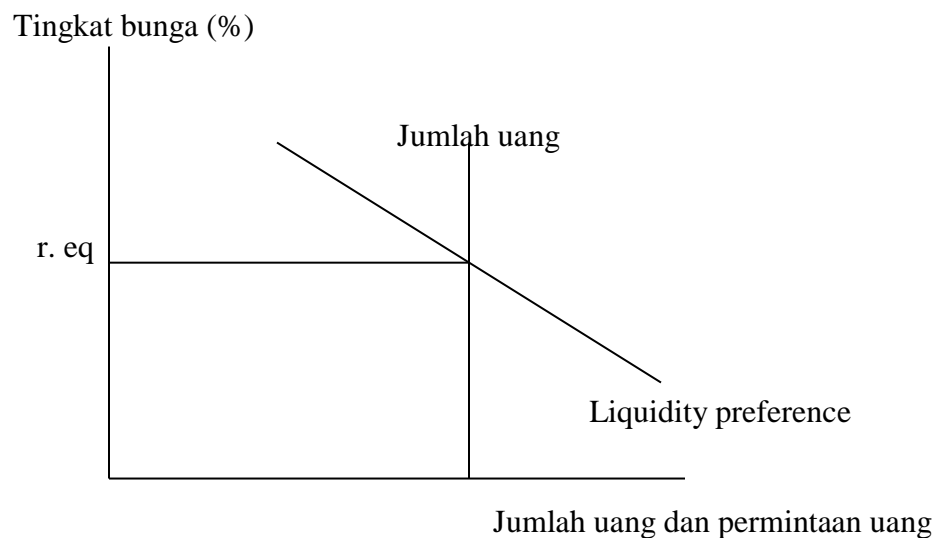
Uang, menurut Keynes adalah merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki seseorang (portofolio) seperti halnya kekayaan dalam bentuk tabungan di bank, saham atau surat berharga lainnya. Keputusan masyarakat mengenai bentuk susunan / komponen daripada kekayaan mereka, berapa besar dari kekayaan mereka akan diwujudkan dalam bentuk uang kas, tabungan atau surat berharga akan menentukan tingginya tingkat bunga.

Untuk menyederhanakan modelnya, Keynes hanya membagi susunan / komponen kekayaan dalam dua bentuk, yakni uang kas dan surat berharga (obligasi) Keuntungan apabila kekayaan diwujudkan dalam bentuk uang kas adalah kemudahan dalam melakukan transaksi sebab uang kas merupakan alat pembayaran yang paling likuid. Likuid diukur dengan kecepatan menukar kekayaan dalam bentuk alat pembayaran (untuk transaksi) tanpa adanya kerugian nilai. Jadi uang tidak ada resiko capital gain atau loss seperti halnya pada bentuk kekayaan yang lain. Tetapi, bentuk kekayaan dalam uang kas tidak dapat memberikan penghasilan (misalnya berupa uang) Sebaliknya kekayaan dalam bentuk surat berharga, dimana harganya dapat naik turun tergantung tingkat bunga (apabila tingkat bunga naik harga surat berharga turun dan sebaliknya), sehingga ada kemungkinan pemegang surat berharga akan menderita capital loss

atau gain. Namun demikian, surat berharga mendatangkan pendapatan yang berupa bunga.

Permintaan akan uang, oleh Keynes disebut dengan “Liquidity preference” (permintaan uang) tergantung daripada tingkat bunga. Dalam gambar sumbu horizontal mengukur jumlah dan permintaan uang dengan sumbu vertical untuk tingkat bunga.

Teori Keynes tentang tingkat bunga



Permintaan akan uang mempunyai hubungan negatif dengan tingkat bunga sebagai berikut;

1. Keynes menyatakan bahwa masyarakat mempunyai keyakinan adanya suatu tingkat bunga yang normal. Apabila tingkat bunga turun dibawah tingkat normal, makin banyak orang yakin bahwa tingkat bunga akan kembali ke tingkat normal (jadi mereka yakin bahwa tingkat bunga akan naik di waktu yang akan datang) Jika mereka memegang surat berharga pada waktu tingkat bunga naik (dus, harganya turun) mereka akan menderita kerugian (capital loss). Mereka akan menghindari kerugian ini dengan cara mengurangi surat berharga yang dipegangnya dan dengan sendirinya menambah uang kas yang

- dipegang, pada tingkat bunga naik. Hubungan ini disebut motif spekulasi tentang harga surat berharga di masa yang akan datang.
2. Berkaitan dengan ongkos memegang uang kas (opportunity cost of holding money). Makin tinggi tingkat bunga, makin tinggi pula ongkos memegang uang kas (dalam bentuk tingkat bunga yang tidak diperoleh karena kekayaan diwujudkan dalam bentuk uang kas) sehingga keinginan memegang uang kas juga turun. Sebaliknya, apabila tingkat bunga turun berarti ongkos memegang uang kas juga makin rendah sehingga permintaan akan uang kas naik.

Kedua pendekatan di atas semuanya menjelaskan adanya hubungan negatif antara tingkat bunga dengan permintaan akan uang kas > bersama dengan jumlah uang yang tepat (dengan anggapan bahwa jumlah uang yang beredar ini ditetapkan oleh pemerintah), permintaan uang ini menentukan tingkat bunga.

Apabila pada suatu ketika tingkat bunga dibawah tingkat keseimbangan, masyarakat akan menginginkan uang kas lebih banyak dengan cara menjual surat berharga yang dipegangnya. Usaha menjual surat berharga akan mendorong harganya turun (tingkat bunga naik), sampai ke tingkat keseimbangan dalam mana masyarakat sudah puas dengan komposisi kekayaannya (permintaan sama dengan penawaran uang).

Sebaliknya, apabila tingkat bunga berada di atas keseimbangan, masyarakat menginginkan uang kas lebih sedikit dengan cara membeli surat berharga. Pembelian ini akan mengakibatkan naiknya harga surat berharga (tingkat bunga turun) sampai keseimbangan tercapai.

6. Kebijakan Moneter

Dengan jumlah uang yang beredar sebanyak Rp 6 trilyun. Penambahan jumlah uang sebesar Rp 1 trilyun (menjadi Rp 7 trilyun) mengakibatkan bahwa pada tingkat bunga mula-mula (r_6) masyarakat mempunyai kelebihan uang yang dipegangnya (lebih besar daripada yang diinginkan untuk dipegang)

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroellah

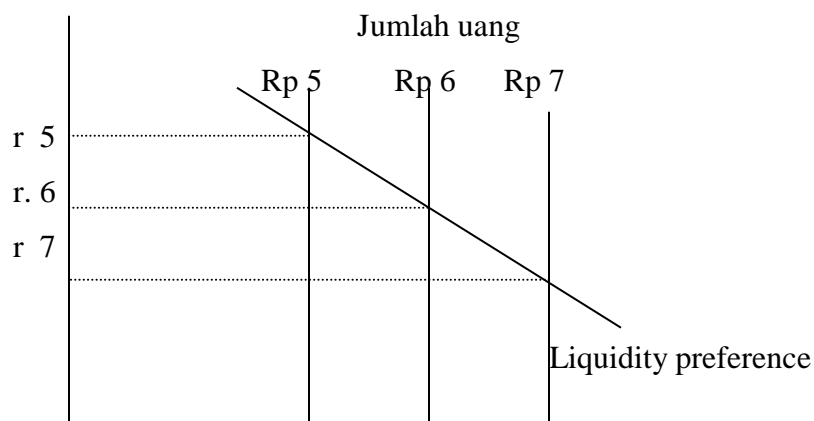
Oleh karena itu mereka berusaha untuk membuang kelebihan uang kas yang dipegangnya dengan cara membeli surat berharga. Hal ini mengakibatkan harga surat berharga naik, karena tingkat bunga turun, sampai keinginan memegang uang sama dengan jumlah uang, dan hal ini terjadi setelah tingkat bunga turun menjadi r_7 , dimana permintaan uang sama dengan jumlah uang yang ada.

Implikasi dari penambahan jumlah uang beredar terhadap GNP dapat dijelaskan melalui tingkat bunga. Turunnya tingkat bunga surat berharga (sebagai akibat bertambahnya jumlah uang) berarti naiknya pengeluaran investasi, *ceteris paribus* (artinya hal-hal lain tidak berubah)

Sebaliknya, turunnya jumlah uang yang beredar menjadi Rp 5 trilyun (dari Rp 6 trilyun), maka pada tingkat bunga mula-mula (r_6), masyarakat mengalami kekurangan uang kas yang dipegangnya (lebih rendah daripada yang ingin dipegangnya). Masyarakat berusaha memenuhi kekurangan dengan cara menjual surat berharga. Akibatnya, tingkat bunga naik (harga surat berharga turun) kenaikan ini terus terjadi sampai apa yang diinginkan masyarakat persis sama dengan jumlah uang beredar. Hal ini akan tercapai setelah tingkat bunga naik menjadi r_5 , dimana permintaan uang sama dengan jumlah uang beredar.

Efek perubahan jumlah uang terhadap tingkat bunga

Tingkat bunga (%)



Jumlah uang dan permintaan uang

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Implikasi kebijaksanaan penurunan jumlah uang beredar terhadap GNP merupakan kebalikan proses di atas, yakni dengan naiknya tingkat bunga (akibat pengurangan jumlah uang) pengeluaran investasi turun sehingga GNP juga turun.

Hubungan negatif antara tingkat bunga dengan permintaan akan uang memegang peranan penting dalam model Keynes tentang penentuan pendapatan nasional. Juga merupakan jalur penghubung antara perubahan jumlah uang beredar dengan GNP. Penambahan jumlah uang akan efektif atau tidak dalam arti dapat menambah GNP atau tidak tergantung pada keadaan tertentu. Keynes menyatakan bahwa pada tingkat bunga yang sangat rendah permintaan akan uang menjadi elastis tak terhingga (horizontal)

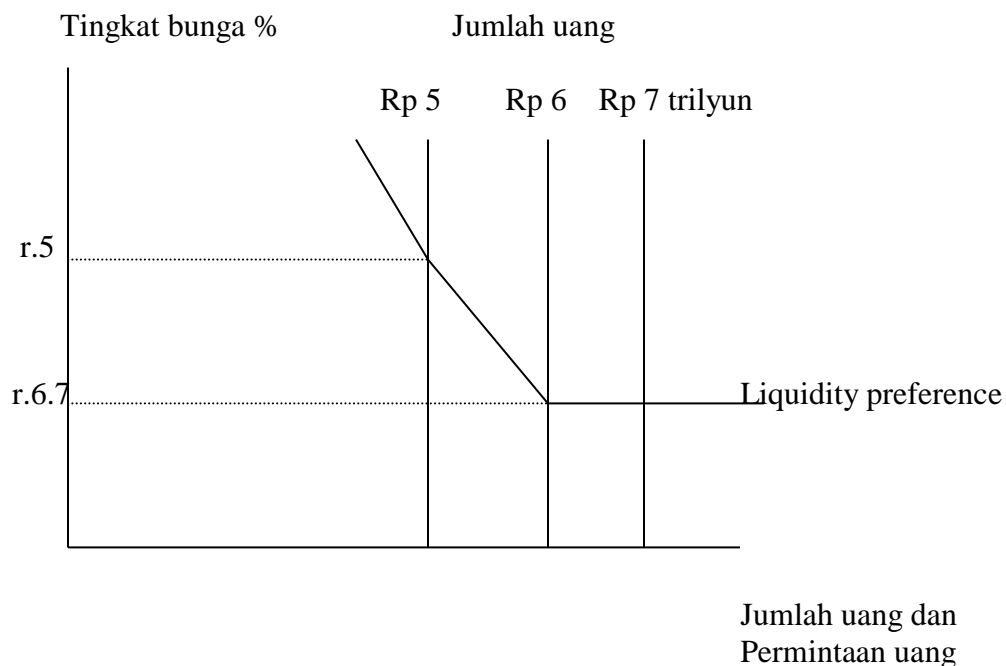
Penambahan jumlah uang dari Rp 6 trilyun menjadi Rp 7 trilyun tidak dapat mengubah / menurunkan tingkat bunga. Apa sebab permintaan akan uang dapat elastis tak terhingga (horizontal) ?

Alasannya Keynes menyatakan bahwa pada tingkat bunga yang sangat rendah, setiap orang akan berharap bahwa tingkat bunga akan naik kembali ke normal di masa yang akan datang. Dengan kata lain setiap orang akan berharap harga surat berharga akan turun di masa datang sehingga tidak ada seorangpun yang akan mau membeli surat berharga sekarang, semuanya menghendaki kas (permintaan uang dengan demikian menjadi elastis tak terhingga)

Setiap ada penambahan jumlah uang (oleh pemerintah) akan selalu disimpan dalam bentuk kas oleh masyarakat, tidak digunakan untuk membeli surat berharga sekarang, karena harganya tinggi sekali.

Mereka menanti karena harapannya di kemudian hari harga surat berharga akan turun (tingkat bunga akan naik). Dalam hal ini disebut dengan “liquidity trap” bagian yang horizontal dari kurva permintaan akan uang.

Liquidity Trap



7. Permintaan Uang Untuk Transaksi

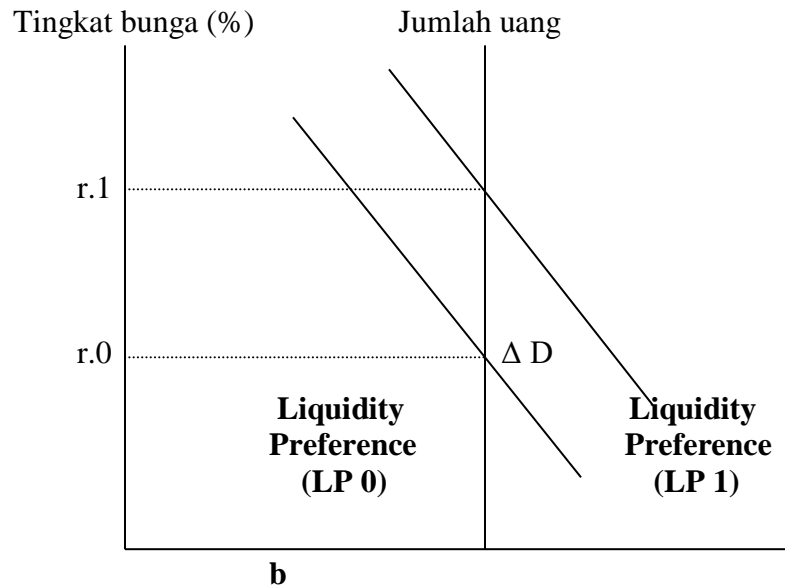
Adanya motif menyimpan uang untuk spekulatif pertama-tama dikemukakan oleh Keynes. Sebelumnya itu kaum klasik lebih menekankan pada motif transaksi (dan berjaga-jaga) yang besarnya tergantung daripada GNP. Kenaikan GNP akan mendorong permintaan uang untuk transaksi naik, sebab masyarakat menginginkan uang kas yang lebih banyak untuk melakukan jumlah transaksi yang lebih besar. Keynes mengakui adanya motif transaksi ini tetapi tidak dipandang penting.

Implikasi dari ketergantungan permintaan uang atas GNP ini adalah bahwa tingkat bunga akan berubah manakala terjadi perubahan GNP, sebab perubahan GNP akan

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

mempengaruhi permintaan uang. Dengan jumlah uang yang tetap, berubahnya permintaan uang akan menyebabkan perubahan tingkat bunga.

Perubahan tingkat bunga yang disebabkan oleh adanya perubahan permintaan akan uang



Penjelasan:

Kenaikan GNP akan menyebabkan bergesernya kurva permintaan akan uang dari LP 0 ke LP 1. Apabila jumlah uang tetap, maka tingkat bunga akan naik dari $r.0$ ke $r.1$. Sebab pada tingkat bunga $r.0$ masyarakat mengalami kekurangan uang kas (kelebihan permintaan sebesar ΔD) Untuk memenuhi kekurangan ini, usaha yang dilakukan adalah menjual surat berharga, sehingga tingkat bunga naik (harga surat berharga turun) sampai keseimbangan tercapai pada $r.1$. Dengan kenaikan GNP, maka pada setiap tingkat bunga masyarakat menghendaki jumlah uang kas yang lebih besar untuk transaksi sehingga kurva LP bergeser ke kanan atas.

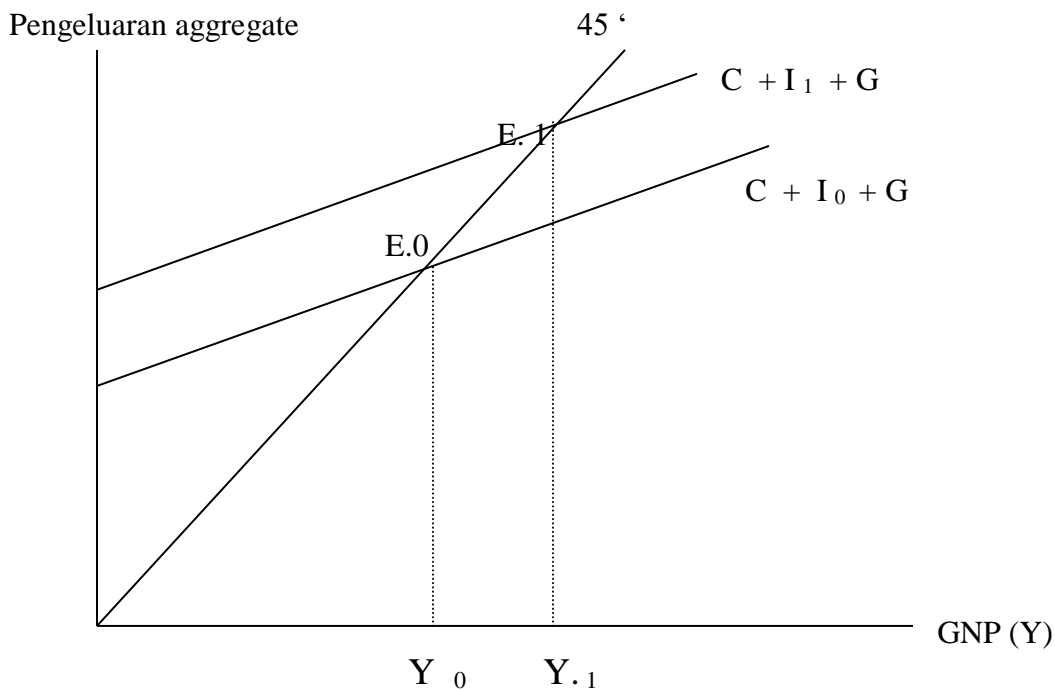
Permintaan uang untuk tujuan transaksi tidaklah semata-mata dipengaruhi oleh GNP. Dalam teori permintaan uang selanjutnya (seperti teorinya: Baumol dan Tobin) dikemukakan bahwa permintaan uang untuk tujuan transaksi juga dipengaruhi oleh tingkat bunga.

8. Analisis Kebijakan

Dengan permintaan uang tetap, kebijakan moneter, ekspansif misalnya penambahan jumlah uang yang beredar akan mendorong tingkat bunga turun yang pada gilirannya akan menaikkan investasi. Lenailam investasi melalui proses multiplier mendorong kenaikan output dan juga employment melalui kenaikan agregat. Secara skematis proses pengaruh kebijakan moneter terhadap permintaan aggregate versi Keynes adalah:



Pengaruh kebijakan moneter terhadap permintaan agregate



Dengan demikian efek kebijakan moneter terhadap permintaan agregate tergantung pada elastisitas tingkat bunga terhadap jumlah uang beredar, elastisitas investasi, terhadap tingkat bunga dan besarnya multiplier. Keynes percaya, bahwa elastisitas tingkat bunga terhadap jumlah uang adalah kecil (nol) sehingga kebijakan moneter kurang / tidak efektif.

POKOK BAHASAN

VII. Uang.

Pendahuluan

Di dalam diagram aliran melingkar antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan dalam melakukan kegiatan melalui suatu “tempat” yang disebut pasar. Sektor rumah tangga menawarkan faktor produksi atau input kepada sektor perusahaan melalui pasar input. Hasil penawaran input kepada sektor perusahaan, sektor rumah tangga memperoleh pendapatan yang berupa uang. Dengan demikian, uang bagi sektor perusahaan digunakan sebagai alat transaksi untuk membeli input dari sektor rumah tangga. Demikian pula ketika sektor perusahaan menawarkan output yang diproduksi kepada rumah tangga melalui pasar output. Hasil penjualan output kepada sektor rumah tangga, sektor perusahaan memperoleh pendapatan berupa uang sebesar pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dengan demikian, uang bagi sektor rumah tangga digunakan sebagai alat transaksi untuk membeli output dari sektor perusahaan.

Ketika perekonomian berada dalam tahapan yang primitive, alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan transaksi bukan berupa uang seperti yang digunakan sekarang. Belum ada alat pembayaran yang digunakan pada perekonomian yang berada dalam tahapan yang primitive karena transaksi dilakukan secara barter.

Di dalam perekonomian yang sudah modern uang merupakan alat tukar yang sangat membantu kelancaran perekonomian. Dalam perekonomian yang sangat sederhana pun uang merupakan alat tukar yang penting. Uang merupakan alat pembantu dalam kelancaran perniagaan. Asal mulanya uang adalah sebagai akibat yang logis dari kesulitan yang timbul dari keadaan tukar menukar barang dengan barang yang disebut “natura” atau “Barter”. Tukar menukar tersebut makin hari makin berkembang, barang-barang yang ditukar semakin banyak dan beraneka ragam. Keadaan tersebut menimbulkan kesulitan-kesulitan antara lain disebabkan karena:

1. Tukar menukar akan terjadi hanya dengan golongan yang memerlukan barang-barang yang akan ditukar.
2. Ketidakpastian terjadinya tukar menukar, walaupun barang-barang sudah tersedia dan saling diperlukan.

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Akibat dari kesulitan-kesulitan tukar menukar barang dengan barang / barter timbullah benda-benda yang dijadikan sebagai alat untuk “mempermudah tukar menukar”

Jadi yang dimaksud dengan uang ialah: Segala sesuatu yang diterima oleh umum sebagai alat pembayaran yang syah untuk mempermudah dalam tukar menukar. Jadi bila alat pembayaran yang tidak diterima oleh umum bukan uang, misalnya ceque (cek).

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut:

Bahwa syarat-syarat benda bisa digunakan sebagai uang adalah:

- 1. Digemari umum**
- 2. Memiliki nilai yang tinggi dan stabil, walaupun kecil**
- 3. Tahan lama dan tidak mudah rusak**
- 4. Mudah disimpan dan mudah dipindah-pindahkan**
- 5. Kualitas mudah di kontrol**
- 6. Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilainya.**
- 7. Jumlahnya terbatas, sehingga tetap berharga**
- 8. Mudah dibedakan dengan barang yang lain.**

Peranan dan Fungsi Uang

Uang tidak lain adalah segala sesuatu yang dapat dipakai / diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun utang.

Secara umum uang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai Satuan Pengukuran Nilai.

Dengan fungsi ini maka nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan. Misalnya, di Indonesia rupiah adalah dasar pengukur nilai dari barang-barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar.

Seseorang dapat mengukur nilai sebuah mobil atau rumah dengan rupiah, bahkan dengan diketahuinya nilai rupiah dari mobil dan rumah, maka dapat diketahui pula perbandingan nilai antara mobil dan rumah. Bayangkan kalau suatu perekonomian yang tanpa uang mungkin harga sepeda dinilai 1/20 mobil.

b. Sebagai Alat Tukar menukar

Fungsi ini memisahkan antara keputusan membeli dengan keputusan menjual. Adanya uang sebagai alat didalam tukar menukar dapat menghilangkan perlunya ada kesamaan keinginan sebelum terjadinya pertukaran. Kesamaan keinginan harus ada lebih dahulu untuk terjadinya tukar menukar barang dengan barang (barter). Dengan adanya uang keharusan adanya kesamaan keinginan ini tidak perlu ada untuk terjadinya pertukaran. Prosesnya, barang ditukar dengan uang, dan dengan uang ini dapat membeli / menukarkan dengan barang lain.

c. Sebagai Alat Penimbun / Penyimpan Kekayaan

Kekayaan seseorang dapat berupa barang atau uang. Dalam bentuk barang misalnya: rumah, mobil, perhiasan dan sebagainya, sedang dalam bentuk uang misalnya: uang kas dan surat-surat berharga. Dengan demikian seseorang dapat menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang kas. Dalam pengertian inilah uang berfungsi sebagai alat penimbun kekayaan.

Jenis Uang

Pada umumnya negara-negara di dunia ini termasuk Indonesia menggunakan dua jenis mata uang untuk melakukan pembayaran di dalam negeri yaitu “Uang Kartal” dan “Uang Giral”

1. Uang Kartal (Common Money)

Kartal dapat terdiri dari uang kertas dan uang logam yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sampai jumlah tak terbatas.

a. *Uang Kertas*

Adalah uang yang dibuat dari kertas

Ada dua macam uang kertas, diantaranya:

- * Uang kertas Bank adalah uang kertas yang dicetak dan diedarkan oleh Bank sentral dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, sampai jumlah yang tidak terbatas,
- * Uang kertas Pemerintah / negara adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah / Departemen keuangan dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

b. *Uang logam*

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Adalah uang yang dibuat dari logam.

Ada tiga macam uang logam, yaitu:

1. Uang standar / baku adalah uang yang merupakan standar keuangan suatu negara.

Misalnya: f 10 mengandung emas murni 6,048 g

F 1 mengandung emas murni 7,322 g

Tanda-tandanya:

- * Setiap orang bebas membuat dan melebur mata uang.
- * Nilai nominal sama dengan nilai intrinsik / bahannya.
- * Merupakan alat pembayaran yang sah sampai jumlah tidak terbatas.

2. Uang tanda merupakan uang yang nilainya tergantung dari nilai nominalnya.

Tanda-tandanya:

- * Pembuatannya tidak terbatas, hanya pemerintah yang berhak
- * Merupakan alat pembayaran yang sah sampai jumlah terbatas.

3. Uang pas merupakan alat pembayaran yang sah sampai jumlah terbatas dan diatur oleh pemerintah.

Tanda-tandanya:

- * Umum dilarang membuatnya
- * Merupakan alat pembayaran yang sah
- * Jumlahnya terbatas dan diatur oleh pemerintah

2. Uang Giral (Bank Deposit Money)

Adalah simpanan seseorang atau badan usaha pada suatu bank, yang dapat diambil dengan cek atau dipindahkan dengan giro bilyet sewaktu-waktu. Jadi uang giral merupakan hutang sesuatu bank pada seseorang atau badan usaha, yang dapat ditagih sewaktu-waktu atau tanda bukti tagihan pada suatu bank.

Uang giral disebut juga “*bank deposito money*” merupakan uang yang hanya sah secara ekonomis, tetapi secara hukum tidak. Oleh karena itu orang tidak dapat dituntut jika tidak bersedia menerimanya sebagai alat pembayaran.

Cek akan dipergunakan menganbil uang, bila pemilik uang giral itu ingin menariknya dalam bentuk uang tunai (uang kartal). Tetapi dalam perkembangannya cek itu sendiri digunakan untuk membayar transaksi perniagaan, sehingga cek

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

dikatakan sebagai alat pembayaran. Sedangkan giro bilyet digunakan untuk mentransfer uang dari rekening seseorang ke rekening pihak lain. Dengan demikian giro bilyet itu tidak dapat disebut sebagai alat pembayaran, melainkan hanya merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan dana dari rekeningnya kepada rekening pihak lain.

a. Terjadinya uang Giral

Adapun terjadinya uang Giral adalah karena:

- * Penyerahan / penyimpanan uang chartal di bank, sewaktu-waktu dapat diambil dengan cek atau giro (primary deposits)
- * Penjualan saham perusahaan melalui bank.
- * Penerimaan / pinjaman / kredit dari bank (loan deposits)

b. Keuntungan penggunaan uang giral

- * Memudahkan pembayaran, karena tanpa menghitung uang pada waktu mengadakan pembayaran.
- * Keamanan lebih terjamin.
- * Resiko kehilangan lebih kecil dari pada uang kartal
- * Lebih mudah dibawa kemana-mana.

c. Perbedaan uang kartal dan uang giral

Uang Kartal	Uang Giral
<ol style="list-style-type: none">1. Berwujud uang2. Diterima oleh umum sebagai alat Pembayaran3. Beredar diseluruh lapisan masyarakat.4. Tidak ada resikonya.	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak berwujud uang2. Umum dapat menolak karena tidak dapat paksaan.3. Beredar dilapisan tertentu seperti Pengusaha / golongan ekonomi kuat.4. Apabila terjadi sesuatu dengan bank, resikonya ditangan sendiri.

POKOK BAHASAN

8. Lembaga Keuangan (Bank) dan Kebijakan Moneter.

Pengertian Bank Dan Fungsi bank

Istilah bank berasal dari BANCA yaitu meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Adapaun yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam usaha meningkatkan taraf hidup rakyat banyak .

Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa fungsi Bank adalah:

5. Bank Sebagai penghimpun dana.

Simpanan uang di Bank terbagi atas tiga bentuk.

- i. Rekening Koran / giro / demand deposit money adalah simpanan yang sewaktu-waktu dapat diminta kembali atau dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan mempergunakan cek / perintah membayar.
- ii. Deposito berjangka (time deposit money) adalah simpanan pada bank yang dapat diambil setelah jangka waktu tertentu.
- iii. Tabungan adalah simpanan di Bank yang hanya dapat diambil kembali dengan syarat-syarat tertentu.

6. Bank sebagai pemberi kredit

Pemberian kredit Bank dapat dilakukan dengan cara-cara:

1. Uang yang ada pada Bank itu dipinjamkan kepada orang / badan yang memerlukan kredit, atau dibelikan surat-surat berharga, sehingga menghasilkan keuntungan.

2. Bank dapat menciptakan kredit.

7. Bank sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran

Usaha bank sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran, ada tiga cara:

1. Bila seseorang telah menjadi nasabah bank, ia dapat membayar kepada orang lain dengan cek
2. Bila pihak lain juga mempunyai rekening bank, cara pembayaran dapat dilakukan dengan giro bilyet.

3. Selain itu bank dapat menyelenggarakan jasa-jasa seperti: penerimaan uang, inkaso, jual beli saham dan valuta asing lain-lain
8. Mengedarkan uang, menjaga dan memelihara stabilitas nilai uang.

Jenis-jenis Bank

Jenis Bank dapat dibedakan atas:

Jenis Bank berdasarkan fungsinya.

Menurut undang-undang pokok perbankan No 7 tahun 1992 berdasarkan fungsinya Bank dapat dibagi dalam 2 jenis:

1. Bank Umum adalah Bank yang dalam pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu serta memberikan kredit dan dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang dalam pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan berupa deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu serta memberikan kredit dalam jangka pendek dan menengah.

Jenis Bank berdasarkan kepemilikan modalnya.

Berdasarkan kepemilikan modalnya, Bank Indonesia dibedakan atas tiga jenis:

1. Bank Pemerintah, yaitu bank yang modalnya dimiliki pemerintah. Bank pemerintah dibagi atas tiga jenis yaitu:
 - a. Bank umum.
 - b. Bank Pembangunan
 - c. Bank Tabungan
2. Bank Swasta Nasional, yaitu bank yang modalnya dimiliki oleh pengusaha nasional Indonesia.

Bank Swasta Nasional dibagi atas tiga jenis, yaitu:

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank tabungan

3. Bank Swasta Asing, yaitu cabang dari bank asing yang berpusat di luar negeri yang kegiatan operasinya diatur dengan ketentuan sendiri.

Jenis Bank Berdasarkan Penetapan Cash Ratio

Berdasarkan kelompok penetapan cash ratio, maka bank dibagi tiga jenis, yaitu:

1. Bank pemerintah dan asing, termasuk dalam kelompok pertama.
2. Bank swasta devisa, yaitu bank swasta yang bisa melakukan transaksi pembayaran luar negeri.
3. Bank swasta non devisa, yaitu bank swasta yang tidak bisa melakukan transaksi pembayaran luar negeri.

Jenis Bank Berdasarkan Institusi Penciptaan Uang

Berdasarkan institusi penciptaan uang, maka bank dibagi atas dua jenis, yaitu:

1. Bank primer, adalah bank yang menciptakan, mengedarkan, menjaga stabilitas nilai uang dan memberikan kredit likuiditas bank, misalnya bank Sentral.
2. Bank Sekunder, yaitu bank yang tidak menciptakan uang kartal dan memberikan kredit pada masyarakat. Yang termasuk bank sekunder adalah bank desa, bank pasar, bank pegawai, bank koperasi, dan bank – bank lain yang dipersamakan dengan bank itu.

3. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Lembaga keuangan bukan bank banyak didirikan tahun 1972. Tujuan untuk mendorong pengembangan pasar uang dan pasar modal, serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan, terutama pengusaha golongan ekonomi lemah. Untuk tujuan tersebut LKBB diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat, dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada perusahaan-perusahaan dan melakukan kegiatan sebagai perantara dalam penerbitan surat-surat berharga, serta menjamin terjualnya surat-surat berharga tersebut.

Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) merupakan lembaga yang berfungsi untuk mobilisasi dana yang kegiatannya dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. investasi
2. pembiayaan pembangunan
3. jenis pembiayaan lainnya/pemilikan tanah.

4. Kebijakan Moneter.

1. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter ialah suatu kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dari sector uang/pasar uang.

2. Tujuan Kebijakan Moneter

Adapun tujuan kebijakan moneter adalah untuk:

- a. menjaga stabilitas nilai uang
- b. mengatasi inflasi atau deflasi
- c. sebagai alat untuk menjaga stabilitas perekonomian suatu negara

3. Macam-macam Kebijakan Moneter

(Kebijakan pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat)

a. Politik Diskonto, yaitu:

Politik untuk mempengaruhi jumlah uang dan kredit dengan menaikkan atau menurunkan tingkat bunga atau suku bunga bank.

Contoh: Pada saat terjadi inflasi, berarti jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan, sehingga harga naik. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah melalui bank Sentral melaksanakan kebijakan menaikkan tingkat bunga, sehingga masyarakat berbondong-bondong menabung pada bank, sehingga banyak uang masuk kas pemerintah dan mengakibatkan jumlah uang yang beredar turun dari inflasi dapat dikendalikan atau diatasi.

Pengaruhnya bagi jumlah kredit adalah sebagai berikut:

Pada saat terjadi inflasi bank menaikkan tingkat bunga, sehingga bunga kredit naik/tinggi, akibatnya jumlah uang yang beredar berkurang dan inflasi dapat diatasi, karena banyak orang melunasi kredit.

b. Politik Pasar Terbuka (Open market operation)

Suatu politik bank untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara membeli atau menjual surat-surat berharga pada bursa efek. Proses bekerjanya politik ini sama dengan politik diskonto.

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Misalnya: Pada waktu terjadi inflasi, bank menjual surat-surat berharga kepada masyarakat, sehingga uang yang kelebihan tersebut masuk ke kas dan inflasi dapat diatasi dan sebaliknya, jika terjadi **DEFLASI**, bank membeli surat-surat berharga, sehingga uang kas keluar dan dapat menambah jumlah uang yang beredar, sehingga deflasi dapat diatasi.

c. Politik Cadangan pada Bank (Ratio Reserve Requirement), yaitu:

Politik bank sentral untuk menetapkan jumlah minimum cadangan bank yang harus ada pada bank sentral.

Misalnya: Suatu Bank pemerintah mempunyai uang Rp 100.000.000,- Pemerintah telah menetapkan cadangan 20%, maka uang boleh diedarkan oleh bank tersebut maksimum ($100\% - 20\% = 80\% \times \text{Rp } 100.000.000,- = \text{Rp } 80.000.000,-$). Jadi cadangan minimum yang harus ada pada bank sentral = Rp 20.000.000,-

d. Politik Pembatasan Pemberian kredit selective atau seleksi kredit.

Bank dalam memberikan kredit yang dapat dibedakan atas:

1. KWANTITATIF

Yaitu : Pemerintah membatasi jumlah maksimum pemberian kredit.

2. KWALITATIF

Yaitu: Pemerintah menyelidiki penting atau tidaknya pemberian kredit.

Jika dianggap tidak penting permohonan kredit tersebut ditolak.

5. Teori Moneter Klasik.

a. Pendahuluan.

Tiang utama dari teori moneter klasik adalah J.B. Say, Irving Fisher dan A. Marshall.

J.B. Say terkenal karena hukum yang dikemukakannya, bahwa penawaran akan selalu menciptakan permintaan (supply creates its own demand) artinya, bahwa suatu perekonomian tidak akan mengalami underemployment atau apa yang oleh Malthus dinamakan under-consumption. Pengeluaran total masyarakat akan selalu dapat mencukupi untuk menunjang produksi pada keadaan kesempatan kerja penuh (full employment)

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Namun demikian, potensi output yang dapat dihasilkan tergantung daripada tingkat teknologi dan banyaknya factor produksi tenaga kerja. Makin tinggi tingkat teknologi dan makin tinggi jumlah dan kualitas tenaga kerja tingkat output potensial yang dapat dihasilkan juga makin besar. Artinya, tingkat full employment output dapat menjadi lebih besar. Keadaan yang selalu pada full employment ini dapat tercapai melalui bekerjanya mekanisme pasar, yang oleh Adam Smith disebut dengan “invisible hand”

b. Teori Klasik Tentang Tingkat Bunga

Tabungan menurut teori klasik adalah fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya, pada tingkat bunga yang lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan / mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungan

Investasi juga tergantung / merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, keinginan untuk melakukan investasi juga makin kecil. Alasannya, seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga yang harus dia bayar untuk dana investasi tersebut yang merupakan ongkos untuk penggunaan dana (cost of capital) Makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga makin kecil.

Tingkat bunga dalam keadaan keseimbangan (artinya tidak ada dorongan untuk naik atau turun) akan tercapai apabila keinginan menabung masyarakat sama dengan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi

c. Teori Kuantitas Uang

Menurut paham klasik, uang tidak mempunyai pengaruh terhadap sector riil, tidak ada pengaruhnya terhadap tingkat bunga, kesempatan kerja, atau pendapatan nasional. Pendapatan nasional ditentukan oleh jumlah kualitas daripada tenaga kerja, jumlah daripada modal yang dipakai serta teknologi. Tanpa perubahan dari factor-faktor produksi, maka pendapatan nasional tidak akan berubah. (Namun kaum neo-klasik, yang kemudian mempunyai pendapat yang ekstrim seperti di atas . menurut mereka uang, mempunyai pengaruh terhadap sector riil, terutama dalam keadaan belum full employment)

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Uang, pengaruhnya hanyalah terhadap harga-harga barang. Bertambahnya uang beredar akan mengakibatkan kenaikan harga saja. Jumlah output yang dihasilkan tidak berubah. Inilah yang sering disebut dengan classical dichotomy, merupakan pemisahan sektor moneter dengan sektor riil. Sektor moneter tidak ada hubungan dengan sektor riil. Uang hanya merupakan suatu tudung (“veil”) saja dalam perekonomian. Teori kuantitas uang, yang pada dasarnya menjadi tulang punggung adanya kesimpulan diatas.

Menurut teori kuantitas uang, perubahan jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan perubahan harga secara proporsional. Artinya, kalau jumlah uang naik dua kali, maka harga akan naik dua kali juga. Pandangan demikian didasarkan pada anggapan-anggapan sebagai berikut:

- a. Dalam persamaan $M.V = P.T$ dianggap tetap karena selalu berada dalam keadaan full employment (atas dasar hukum Say)
- b. Velocity juga dianggap tetap. Velocity ini hanya akan berubah kalau terjadi perubahan dalam kebiasaan masyarakat melakukan pembayaran. Seperti misalnya penggunaan alat-alat pembayaran baru akan mempengaruhi banyaknya transaksi yang dilakukan.

Demikian juga, kebiasaan pembayaran dengan kredit, akan mendorong masyarakat lebih banyak melakukan transaksi sehingga velocitynya akan naik. Biasanya perubahan dalam kebiasaan melakukan pembayaran ini berjalan lambat (dalam waktu yang relatif lama), sehingga dengan demikian velocity dapat pula dianggap tidak berubah. Dalam persamaan Marshall, maka sebagai konsekuensinya (karena $k = 1/V$) dapat pula dianggap tetap

Implikasi dari kedua anggapan ini adalah: bahwa jumlah uang beredar hanyalah mempengaruhi harga, dan pengaruhnya proporsional. Uang tidak dapat mempengaruhi output riil (Y) Output riil hanya akan berubah kalau terdapat perubahan dalam jumlah dan kualitas dari faktor-faktor produksi. Dengan demikian uang tidak dapat mempengaruhi sektor riil, pengaruhnya terbatas pada sektor moneter saja. Pemisahan pengaruh uang terhadap sektor riil dan moneter inilah yang sering disebut dengan classical dichotomy.

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Hubungan proporsional antara jumlah uang dengan harga dapatlah dijelaskan sebagai berikut:

Apabila V dan Y masing-masing tetap pada nilai 4 dan 100, maka dengan jumlah uang beredar (M) = 25, harga (P) akan sama dengan 1 : $MV=PY$

$$25 \times 4 = 1 \times 100$$

Artinya: Jika M naik dua kali, menjadi 50 maka P akan naik dua kali, $50 \times 4 = 2 \times 100$. Secara ringkas proses kenaikan harga ini dapat dijelaskan demikian. Pada permulaannya masyarakat dalam keadaan keseimbangan portofolionya. Kemudian bank sentral menambah jumlah uang beredar dua kali lipat. Akibatnya masyarakat mengalami ketidakseimbangan dalam portofolio-nya, yakni kelebihan uang kas yang dipegang. Mereka akan membelanjakan (membeli barang atau jasa) kelebihan uang kas tersebut. Karena output total tidak bisa bertambah (dalam keadaan full employment, dengan hukum Say) maka harga akan terdorong naik. Masyarakat akan terus membelanjakan kelebihan uang kasnya sampai total pengeluarannya naik dua kali lipat.

Karena output riil tetap kenaikan pengeluaran dua kali akan menyebabkan harga juga naik dua kali. Hasil akhirnya: Jumlah uang yang dipegang masyarakat naik dua kali, GNP nominal (PY) naik dua kali, harga naik dua kali, velocity dan output riil tetap seperti semula (sebelum adanya penambahan jumlah uang)

Hubungan yang proporsional antara jumlah uang dengan harga seperti di atas dapat pula dijelaskan dengan menggunakan persamaan Marshal. Misalnya $k = 1/4$ (berarti $1/4$ bagian dari GNP diwujudkan dalam bentuk uang kas) Apabila GNP (PY) sama dengan Rp 400 milyar, maka keinginan masyarakat memegang uang kas sama dengan Rp 100 milyar, yakni $M = k PY = 1/4 \times \text{Rp } 400 \text{ milyar}$
 $= \text{Rp } 100 \text{ milyar}$

POKOK BAHASAN

9. Inflasi

a. Pendahuluan.

Inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi makro yang dihadapi oleh hampir semua perekonomian di dunia, termasuk Indonesia. Mengapa inflasi menjadi suatu masalah? Inflasi merupakan indikator utama adanya ketidakstabilan harga suatu perekonomian. Harga yang stabil akan mampu memberikan jaminan pada investor untuk menanamkan modalnya. Bagi pemerintah, kondisi yang stabil tersebut akan membantu untuk merumuskan kebijakan yang dapat memperbaiki kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan bagi masyarakat umum, kestabilan harga akan membuat masyarakat mampu merencanakan kegiatan konsumsi dan juga kegiatan spekulasi terhadap asset yang dimiliki dengan sebaik-baiknya.

Masyarakat sering mempersepsikan kenaikan harga barang-barang kebutuhan sebagai inflasi, naiknya harga barang-barang akan menimbulkan ketidakstabilan perekonomian secara keseluruhan dan hal ini akan mempengaruhi perilaku masyarakat, pengusaha juga pemerintah. Harga di dalam negeri yang stabil akan memberikan kepastian sekaligus jaminan perekonomian yang stabil dan hal ini akan memberikan iklim yang baik terhadap investasi baik yang dilakukan oleh onvestor dalam negeri maupun dari luar negeri

b. Pengertian Dasar

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Yang dimaksud dengan inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi.

Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain:

- i. Indeks biaya hidup (consumer price index)
- ii. Indeks harga perdagangan besar (wholesale price index)
- iii. GNP deflator.

Indeks biaya hidup mengukur biaya / pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk keperluan hidup. Banyaknya barang dan jasa yang tercakup dapat bermacam-macam. Di Indonesia dikenal indeks 9 bahan pokok, 62 macam barang serta 162 macam barang. Karena arti penting masing-masing barang dan jasa tersebut bagi seseorang itu tidak sama, maka dalam perhitungan angka indeksnya diberi angka penimbang tertentu.

Angka penimbang biasanya didasarkan atas besarnya persentase pengeluaran untuk barang tertentu terhadap pengeluaran keseluruhan. Besarnya persentase ini dapat berubah dari tahun ke tahun.

Indeks perdagangan besar menitik beratkan pada sejumlah barang pada tingkat perdagangan besar. Ini berarti harga barang mentah, bahan baku atau setengah jadi masuk dalam perhitungan indeks harga. Biasanya perubahan indeks harga dan sejalan / searah dengan indeks biaya hidup.

GNP deflator adalah jenis indeks yang lain. Berbeda dengan dua indeks di atas, dalam cakupan barangnya. GNP deflator mencakup jumlah barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan GNP, jadi lebih banyak jumlahnya bila disbanding dengan dua indeks di atas. GNP deflator diperoleh dengan membagi GNP nominal (atas dasar harga berlaku) dengan GNP riil (atas dasar harga konstan)

$$\text{GNP deflator} = \frac{\text{GNP Nominal}}{\text{GNP riil}} \times 100\%.$$

c. Penggolongan Inflasi

Inflasi dapat digolongkan tergantung dari apa tujuan kita untuk membahas inflasi. Penggolongan inflasi yang pertama menurut laju inflasi per tahun. Inflasi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu (Boediono, 1982, hal 156):

- a. Inflasi ringan (dibawah 10 % setahun)
- b. Inflasi sedang (antara 10 % - 30 % setahun)
- c. Inflasi berat (antara 30 % - 100 % setahun)
- d. Hiperinflasi (di atas 100 % setahun)

Parah tidaknya inflasi tergantung pada barang apa saja yang mengalami kenaikan harga, dan kelompok masyarakat yang mana yang terkena dampak kenaikan harga tersebut. Jika yang mengalami kenaikan harga adalah barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, baik kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi maupun yang berpendapatan rendah, maka kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah yang paling merasakan dampak kenaikan harga tersebut. Namun jika yang mengalami kenaikan harga adalah barang-barang mewah yang lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan tinggi, maka sebagian besar masyarakat yang berpendapatan rendah tidak akan merasakan dampak kenaikan harga barang tersebut.

d. Jenis Inflasi Menurut Sifatnya

Laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda.

Atas dasar besarnya laju inflasi; dapatlah inflais dibagi ke dalam tiga kategori, yakni: merayap (creeping inflation), inflasi menengah (galloping inflation) serta inflasi tinggi (hyper infltion) Sebenarnya pembagian ke dalam tiga kategori ini tidak ada patokan / standar yang pasti. Biasanya creeping inflation ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10 % per tahun)> kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama.

Inflasi menengah (galloping inflation) ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya double digit atau bahkan triple digit) dan kadangkala berjalan

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya harga-harga minggu / bulan ini lebih tinggi dari minggu / bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih besar daripada inflasi yang merayap (creeping inflation)

Inflasi tinggi (hyper inflation) merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjai / ditutup dengan mencetak uang

e. Jenis Inflasi Menurut Sebabnya.

Sebelum kebijaksanaan untuk mengatasi inflasi diambil, perlu terlebih dahulu diketahui factor-faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi.

Menurut teori kuantitas sebab utama timbulnya inflasi adalah kelebihan permintaan yang disebabkan karena penambahan jumlah uang beredar.

1. Demand – pull inflation.

Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (aggregate demand), sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Dalam keadaan hampir kesempatan kerja penuh, kenaikan permintaan total di samping menaikkan harga dapat juga menaikkan hasil produksi (output) Apabila kesempatan kerja penuh (full – employment) telah tercapai; penambahan permintaan selanjutnya hanyalah akan menaikkan harga saja (sering disebut dengan inflasi murni) Apabila kenaikan permintaan ini menyebabkan keseimbangan GNP berada di atas / melebihi GNP pada kesempatan kerja penuh maka akan terdapat adanya “Inflation gap”, hal ini dapat menimbulkan inflasi.

2. Cost-push Inflation

Berbeda dengan demand pull inflation, cost-push inflation biasanya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi, inflasi yang dibarengi dengan resesi. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Keadaan ini timbul biasanya dimulai dengan

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

adanya penurunan dalam penawaran total (aggregate supply) sebagai akibat kenaikan biaya produksi.

Kenaikan biaya produksi dapat timbul karena beberapa factor antara lain:

- a. Perjuangan serikat buruh yang berhasil untuk menuntut kenaikan upah.
- b. Suatu industri yang sifatnya monopolistis, manajer dapat menggunakan kekuasaannya di pasar untuk menentukan harga (yang lebih tinggi)
- c. Kenaikan harga bahan baku industri. Salah satu contoh yang tidak asing lagi adalah krisis minyak yang terjadi kenaikan harga minyak. Biaya produksi naik, akibatnya timbul stagnasi, yakni inflasi yang disertai dengan stagnasi. Kenaikan biaya produksi pada gilirannya akan menaikkan harga dan turunnya produksi. Kalau proses ini berjalan terus maka timbullah cost push inflation.

f. Efek Inflasi.

Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi factor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut dengan: equity effect, sedang efek terhadap alokasi faktor produksi, dan produk nasional masing-masing disebut dengan efficiency dan output effects.

1. Efek terhadap Pendapatan (Equity Effect)

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi.

Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi. Misalnya seseorang yang memperoleh pendapatan tetap Rp 500.000,- pertahun sedang laju inflasi sebesar 10 %, akan menderita kerugian penurunan pendapatan riil sebesar laju inflasi tersebut, yakni Rp 50.000,-

Sebaliknya, pihak-pihak yang mendapat keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan persentase lebih besar daripada laju inflasi.

Adanya serikat buruh yang kuat kadangkala berhasil dalam menuntut kenaikan upah dengan persentase lebih besar daripada laju inflasi.

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Dengan demikian inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat. Dengan adanya inflasi seolah-olah merupakan pajak bagi seseorang dan merupakan subsidi bagi orang lain.

2. Efek terhadap Efisiensi (Efficiency Effects)

Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi factor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut.

3. Efek terhadap Output (Output Effect)

Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju ini cukup tinggi (hyper inflation) dapat mempunyai akibat sebaliknya, yakni penurunan output. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun dengan drastis masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dengan output. Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan output.

Intensitas efek inflasi ini berbeda-beda, tergantung apakah inflasi dibarengi dengan kenaikan produksi dan employment atau tidak. Apabila produksi barang ikut naik, maka kenaikan produksi ini sedikit banyak dapat mengerem laju inflasi. Tetapi apabila ekonomi mendekati kesempatan kerja penuh (full employment) intensitas efek inflasi makin besar. Inflasi dalam keadaan kesempatan kerja penuh ini sering disebut dengan inflasi murni (pure – inflation)

g. Dampak adanya Inflasi

1. Dampak inflasi terhadap perekonomian

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Dengan adanya inflasi dapat mendorong penanaman modal spekulatif, pada masa inflasi, seseorang akan merasa lebih aman jika menginvestasikan modalnya dalam bentuk pembelian rumah atau barang berharga lain daripada melakukan investasi yang produktif. Kondisi ini tidak akan menaikkan investasi yang akan berdampak terhadap pendapatan nasional.

Tingkat bunga meningkat dan akan mengurangi tingkat investasi, dalam kondisi inflasi biasanya pemerintah akan menaikkan tingkat bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Namun kenaikan tingkat bunga tersebut akan menyebabkan investor enggan melakukan investasi karena bunga pinjaman yang harus dibayarkan menjadi lebih tinggi. Pada kondisi ini, investor lebih suka menyimpan dana di Bank dan memperoleh pendapatan dari bunga tabungan.

Menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan ekonomi dimasa yang akan datang dimana pertumbuhan ekonomi menjadi tidak bisa lagi diramalkan dengan baik sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap perekonomian suatu Negara.

Menimbulkan masalah neraca perdagangan, dimana dengan adanya inflasi akan menyebabkan harga barang impor menjadi lebih murah daripada barang yang dihasilkan di dalam negeri, karena itu biasanya inflasi akan menyebabkan impor berkembang lebih cepat daripada perkembangan ekspor.

2. Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat

Dengan adanya inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan, karena pada masa inflasi nilai harta-harta tetap seperti tanah atau bangunan mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada inflasi, sedangkan masyarakat berpendapatan rendah yang biasanya tidak memiliki harta tetap tersebut akan mengalami kemerosotan nilai pendapatan riilnya. Hal ini akan memperlebar ketidaksamaan distribusi pendapatan.

Jika pendapatan riil merosot sebagian besar tenaga kerja memiliki pendapatan nominal yang nilainya tetap. Dalam masa inflasi kenaikan harga barang-barang akan membuat pendapatan riil masyarakat menjadi turun.

3. Inflasi dan pengangguran

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Pada tahun 1958 AW Phillips seorang profesor di London School of Economics menulis artikel berdasarkan studi lapangan tentang adanya hubungan antara kenaikan tingkat upah dan pengangguran di Inggris pada tahun 1861-1957. Dari hasil studi ini beliau memperoleh hubungan negatif antara persentase perubahan upah dengan pengangguran. Pada saat tingkat pengangguran rendah tingkat upah akan naik dan sebaliknya, pada saat tingkat pengangguran tinggi, kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan turunnya tingkat upah.

Pada waktu pengangguran rendah, perusahaan sulit memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan dan perusahaan menawarkan upah yang lebih tinggi untuk memperoleh tenaga kerja. Jadi upah naik dengan cepatnya pada waktu pengangguran rendah. Disisi lain, pada waktu pengangguran tinggi, para pekerja sulit mendapatkan pekerjaan dan perusahaan dapat dengan mudahnya mengisi kekosongan yang dibutuhkan perusahaannya tanpa perlu menaikkan upah.

h. Cara Mencegah Inflasi

Dengan menggunakan persamaan Irving Fisher $MV=PT$, dapat dijelaskan bahwa inflasi timbul karena MV naik lebih cepat daripada T . Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya inflasi maka salah satu variable (M atau V) harus dikendalikan. Disamping ini, volume T ditingkatkan guna mencegah / mengurangi inflasi. Cara mengatur variable M , V dan T tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kebijaksanaan moneter, fiscal atau kebijaksanaan yang menyangkut kenaikan produksi.

POKOK BAHASAN

X. Perdagangan Internasional dan Pembayaran Internasional

10.1. Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan dalam ilmu ekonomi berarti proses tukar-menukar yang terjadi atas keinginan bersama. Sedangkan internasional berarti antarbangsa. Dengan demikian bahwa perdagangan internasional mempunyai arti sebagai proses tukar-menukar yang terjadi antarbangsa

Sedangkan penyebab terjadinya proses tukar-menukar karena beberapa faktor antara lain:

- perbedaan sumber daya alam
- perbedaan selera
- perbedaan iklim
- perbedaan pendapatan
- perbedaan sosial
- perbedaan kebudayaan
- adanya komunikasi dan sarana transportasi

Setiap bangsa ingin menegakkan rumah tangganya. Untuk mengatasi hal itu pemerintah suatu negara mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu, khususnya dalam bidang perdagangan. Suatu negara dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya melakukan kerjasama ekonomi antarbangsa. Hal ini merupakan upaya saling memenuhi kebutuhan sehingga timbul bermacam-macam perdagangan internasional.

Perdagangan internasional membawa akibat berikut:

- a. tiap-tiap negara berusaha memperoleh keuntungan.
- b. dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
- c. Terjadinya arus ekspor dan impor yang dapat menambah pendapatan negara, eksportir maupun importir akan membayar bea sehingga merupakan pendapatan bagi suatu negara.

Macam-macam perdagangan internasional

a. *Perdagangan bilateral*

Perdagangan bilateral yaitu terjalinnya perdagangan antar dua negara.

Contoh: Perdagangan antar Indonesia dengan Birma

b. *Perdagangan regional*

Perdagangan regional merupakan perdagangan yang terjadi dalam satu kawasan

Contoh: Perdagangan yang terjadi pada MEE, dan ASEAN.

c. *Perdagangan multilateral*

Perdagangan multilateral yaitu perdagangan yang dilakukan oleh banyak negara

10.2. Perdagangan dan Pembayaran Internasional

Perkembangan atau pertumbuhan ekspor dari suatu negara sangat berpengaruh terhadap defisit atau surplus neraca pembayaran (*balance of payment*) jumlah utang luar negeri dan besarnya cadangan devisa. Hal ini terbukti di banyak negara berkembang, termasuk juga Indonesia, khususnya selama krisis ekonomi, dimana lesunya ekspor nasional mempunyai andil yang besar terhadap jumlah utang luar negeri dan semakin kecilnya jumlah cadangan valuta asing (valas) yang ada di Bank Indonesia. Oleh sebab itu sering dikatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan untuk keluar dari krisis ekonomi secepatnya adalah dengan cara menggenjot ekspor sekuat-kuatnya.

Bagi negara-negara berkembang, perkembangan dan pertumbuhan volume atau nilai ekspor sangat penting bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di dalam negeri. Pertumbuhan ekspor apabila lebih besar daripada pertumbuhan impor dengan sendirinya akan menambah pemasukan devisa. Sebuah negara berkembang seperti Indonesia yang masih sangat tergantung pada impor dan masih sangat membutuhkan modal dari luar negeri (termasuk pinjaman) karena tabungan nasional belum bisa diandalkan, tentu sangat membutuhkan banyak devisa.

Mungkin sudah merupakan salah satu karakteristik penting dari negara sedang berkembang, terutama negara-negara yang tingkat pembangunan ekonomi atau sektor industrinya masih pada taraf awal (*early state of development*), bahwa jumlah atau laju perkembangan ekspor nonmigas lebih rendah daripada jumlah atau

laju pertumbuhan impor nonmigasnya sehingga selalu mengalami defisit neraca perdagangan yang besar. Sementara arus modal masuk, misalnya dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) relatif kecil. Bahkan banyak negara berkembang yang secara neto neraca modalnya juga selalu negatif. Akibatnya banyak negara berkembang yang mengalami defisit neraca pembayaran terjerumus ke dalam masalah utang luar negeri yang besar.

Akibat krisis ekonomi, jumlah utang luar negeri Indonesia membengkak secara drastis, terutama karena masuknya pinjaman-pinjaman baru dari IMF dan Bank Dunia. Sedangkan laju pertumbuhan ekspor nonmigas yang selama ini sangat diharapkan sebagai

sumber utama devisa negara, ternyata tidak berkembang pesat seperti yang diprediksi oleh teori mengenai dampak positif dari depresiasi nilai tukar mata uang terhadap peningkatan ekspor.

10.3. Teori Perdagangan Internasional

a. Teori Klasik

Teori keunggulan absolut (*absolute advantage*) dari Adam Smith sering disebut sebagai teori murni perdagangan Internasional. Dalam teori ini nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan untuk membuat barang tersebut. Dengan perkataan lain teori ini menggunakan teori nilai tenaga kerja. Dengan asumsi bahwa tenaga kerja sifatnya homogen serta merupakan satu-satunya faktor produksi, menurut teori ini dalam membuat produk X negara A akan lebih efisien daripada negara B yang juga membuat barang yang sama apabila negara pertama jumlah tenaga kerja yang dipergunakan lebih sedikit daripada negara kedua. Artinya, negara A memiliki keunggulan absolut dibanding negara B dalam membuat produk X. Oleh karena itu menurut Adam Smith, negara A sebaiknya melakukan spesialisasi pada produk X, sedangkan negara B pada produk-produk lain di mana negara tersebut secara absolut dapat menghasilkannya dengan ongkos per unit yang lebih rendah daripada negara lain (termasuk negara A)

Suatu negara memiliki keunggulan bisa secara alamiah (*natural advantage*) atau yang dikembangkan (*acquired advantage*).

Keunggulan alamiah yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan sumber daya alam (SDA) dan jumlah tenaga kerja yang berlimpah sehingga upah / gaji per pekerja relatif lebih murah dibanding di negara-negara lain yang jumlah penduduknya (berarti jumlah angkatan / tenaganya) relatif kecil. Keunggulan alamiah ini sangat mendukung perkembangan ekspor komoditas-komoditas primer Indonesia, seperti minyak dan pertanian, sejak dekade 1960-an hingga 1980-an. Keunggulan yang direkayasa misalnya adalah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan atau keterampilan yang tinggi dan masih sangat terbatas di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura dan Taiwan.

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dari J.S Mill menyatakan bahwa suatu negara akan berspesialisasi pada kegiatan mengekspor suatu barang di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif terbesar (suatu barang yang dapat dihasilkan dengan ongkos produksi paling rendah) dan mengimpor barang di mana negara itu memiliki kerugian komparatif (*comparative disadvantage*) (barang yang kalau dibuat sendiri memakan ongkos paling besar)

Teori tersebut diatas sama dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dipakai untuk membuat barang tersebut. Makin banyak tenaga kerja yang dipergunakan, dengan upah per orang sudah ditentukan, semakin mahal biaya atau semakin tinggi harga jual barang tersebut

b. Teori Modern

Sebagaimana yang telah dibahas dalam teori klasik tentang perdagangan Internasional memiliki banyak kelemahan, terutama yang berkaitan dengan asumsiasumsinya. Misalnya, salah satu asumsinya adalah bahwa hanya ada satu faktor produksi, yakni tenaga kerja dan faktor produksi homogen. Dalam kenyataan tidak demikian. Paling tidak ada lima (5) faktor produksi utama, yaitu tenaga kerja, modal, energi, bahan baku, dan teknologi. Tenaga kerja jelas tidak homogen.

Tenaga kerja bisa dibagi ke dalam dua kategori, yakni yang berpendidikan tinggi (*skiled workers*) dan yang berpendidikan rendah (*unskiled workers*) Pembagian ini (melihat faktor produksi tenaga kerja heterogen) ternyata sangat penting dalam membuat analisis-analisis empiris mengenai perkembangan ekspor suatu negara. Lihat misalnya laju perkembangan dan pertumbuhan volume ekspor barang-barang industri (manufaktur) yang sangat pesat dari negara-negara Asia yang digolongkan sebagai the *newly industrializing countries (NICs)* Negara-negara tersebut memang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang sangat tinggi.

Sedangkan negara-negara di dalam kelompok negara berkembang yang sebagian besar dari jumlah angkatan/tenaga kerjanya masih dari golongan berpendidikan rendah, seperti halnya Indonesia hingga saat ini, memiliki tingkat perkembangan dan laju pertumbuhan volume ekspor manufaktur yang masih relatif rendah. Dengan demikian

bahwa ada suatu korelasi positif antara tingkat kemajuan suatu negara dalam ekspor nonmigas (khususnya manufaktur) dan tingkat pendidikan tenaga kerja di negara tersebut.

Di dalam teori keunggulan kompetitif, keunggulan suatu negara di dalam persaingan global selain tergantung pada faktor-faktor keunggulan komparatif (teori klasik) yang dimilikinya dan produksi atau bantuan dari pemerintah, juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor keunggulan kompetitif. Dimana keunggulan kompetitif tidak hanya dimiliki oleh suatu negara, misalnya dalam bentuk kualitas yang tinggi dari SDA yang ada, kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dan pengusaha, dan etos kerja masyarakat yang tinggi, tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan di dalamnya secara individu atau kelompok. Faktor-faktor keunggulan kompetitif yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan apabila ingin unggul dalam persaingan pasar dunia adalah terutama tingkat teknologi serta produktivitas yang tinggi dari faktor-faktor produksi yang digunakan di dalam proses produksi, kualitas yang baik dari barang yang dihasilkan, promosi yang meluas, pelayanan teknis maupun nonteknis yang baik (*service after sale*), pekerja dengan tingkat keterampilan atau pendidikan (SDM)

dan etos kerja serta motivasi yang tinggi, adanya skala ekonomi dalam proses produksi, modal dan sarana serta prasarana lainnya yang cukup, tingkat kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang tinggi, diferensiasi produk, memiliki jaringan distribusi di dalam dan terutama di luar negeri yang luas dan *well-organize*, dan proses produksi yang dilakukan dengan sistem *just-in-time (JIT)*. Faktor-faktor ini semakin penting terutama di pasar internasional dengan persaingan yang semakin tidak sempurna.

10.4. Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran

Di dalam neraca pembayaran (*balance of payments atau BoP*) terdapat neraca perdagangan (*trade balance*) yang berkaitan dengan perdagangan internasional dari negara yang bersangkutan, yakni yang mencatat transaksi ekonomi luar negeri negara tersebut: ekspor dan impor barang (primer dan nonprimer) yang berlangsung dalam suatu kurun waktu tertentu (satu tahun) Sedangkan transaksi berjalan (*current account*) adalah neraca perdagangan ditambah dengan penerimaan neto atas perdagangan jasa dan transfer neto dari luar negeri yang terdiri dari pendapatan bunga dari tabungan atau investasi di luar

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

negeri oleh sektor swasta dan pemerintah (*official transfer*) dan pendapatan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri (seperti TKI dalam kasus Indonesia) Apabila ekspor barang lebih besar daripada impor barang, maka saldo neraca perdagangan positif, tetapi belum tentu saldo transaksi berjalan (TB) positif.

Keadaan seperti ini tergantung pada beberapa hal antara lain:

- Penerimaan atas ekspor atau pemakaian jasa-jasa Indonesia oleh orang asing di dalam negeri (misalnya konsultan nasional, hotel, dan biro perjalanan) maupun di luar negeri (Garuda dengan kantor cabang di luar negeri) lebih besar daripada pembayaran terhadap pemakaian jasa-jasa asing oleh Indonesia
- Pembayaran bunga hutang luar negeri Indonesia lebih kecil daripada penerimaan bunga tabungan atau investasi di luar negeri
- Pendapatan tenaga kerja Indonesia yang mengalir dari luar negeri lebih besar daripada pendapatan yang dibayar Indonesia terhadap orang-orang asing yang bekerja di dalam negeri.

Dengan demikian maka bisa dikatakan bahwa perkembangan neraca perdagangan dan saldo TB Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan ekonomi dunia atau pertumbuhan pendapatan riil rata-rata perkapita di negara-negara pasar utama ekspor Indonesia dan perubahan ekonomi dalam negeri.

10.5. Utang Luar Negeri

Sejak krisis utang luar negeri dunia yang terjadi pada awal dekade 1980-an masalah utang luar negeri yang dialami oleh banyak negara berkembang tidak semakin baik. Banyak negara berkembang semakin terjerumus kedalam krisis utang sampai terpaksa melakukan program-program penyesuaian struktur (*structural adjustment*) terhadap ekonomi dalam negeri mereka atas anjuran dari Bank Dunia dan IMF, sebagai syarat utama untuk mendapatkan pinjaman baru atau pengurangan terhadap pinjaman lama. Hal ini juga dialami Indonesia sejak munculnya krisis rupiah pada pertengahan tahun 1977 yang kemudian disusul oleh krisis ekonomi.

Walaupun ada kecenderungan bahwa semakin maju perekonomian suatu negara, dilihat misalnya pada tingkat pendapatan riil per kapita yang semakin tinggi atau laju pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun yang tinggi, semakin kurang ketergantungannya

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

terhadap pinjaman luar negeri, namun banyak kasus, termasuk Indonesia selama ini menunjukkan tidak demikian. Suatu negara yang memiliki pendapatan perkapita yang tinggi atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum berarti bahwa negara itu dengan sendirinya sudah maju dalam arti *industrialized* dengan struktur ekonomi dan perdagangan luar negeri yang sudah mantap.

Sebagai penyebab besar-kecilnya jumlah utang luar negeri yang dialami oleh banyak negara berkembang antara lain:

- Defisit transaksi berjalan (TB)
- Kebutuhan dana untuk investasi yang melebihi jumlah dana yang tersedia (tabungan) di dalam negeri.
- Inflasi yang tinggi
- Struktur inefficiencies di dalam perekonomian di negara-negara tersebut.

Defisit TB mengakibatkan cadangan devisa berkurang. Apabila saldo TB terus menerus negatif, maka cadangan devisa akan habis, seperti dialami banyak negara sangat miskin di benua Afrika. Negara berkembang sangat membutuhkan devisa, terutama untuk membiayai impor barang-barang modal dan pembantu. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa defisit TB yang berkelanjutan yang dialami oleh banyak negara berkembang hingga sangat ini merupakan penyebab utama negara-negara tersebut terus saja meminjam dari luar negeri, terutama negara-negara yang kondisi ekonomi dalam negerinya tidak menggairahkan investor-investor dari negara-negara maju sehingga sulit bagi negara-negara tersebut untuk mensubstitusi modal dari pinjaman luar negeri dengan modal dari PMA.

Selain itu, defisit TB yang berkepanjangan yang dibiayai oleh cadangan devisa atau pinjaman luar negeri juga akan mengancam kestabilan perekonomian dan kelanjutan dari proses pembangunan ekonomi negara peminjam. Banyak negara berkembang di Afrika dan Amerika Selatan yang menjadi pengutang-pengutang besar pada awal dekade 1980-an mengalami stagnasi dalam proses ekonomi mereka> Goerge (1992) mengatakan bahwa utang luar negeri secara pragmatis justru menjadi bumerang bagi negara penerima. Perekonomian negara-negara penerima tidak semakin baik, tetapi semakin hancur.

Kemudian Rostow (1985) mengatakan bahwa suatu negara bisa tinggal landas jika tidak lagi tergantung kepada utang luar negeri, hal ini disebabkan karena utang luar negeri merupakan kendala serius bagi banyak negara berkembang untuk bisa masuk dalam tahap *take off (tinggal landas)*. Pengamatan ini terjadi selama dekade 1970-an hingga pertengahan 1980-an. Rostow (1985) berpendapat bahwa banyak negara berkembang yang diperkirakan masuk ke tahap lepas landas justru semakin tergantung dan terjatuh utang luar negeri.

POKOK BAHASAN

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ekonomi

XI. Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri

1. Peranan Pemerintah

Peranan pemerintah dalam hal ini adalah campur tangannya terhadap proses perkembangan ekonomi untuk masing-masing negara mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Seperti di Jepang, Jerman dan USSR pemerintah memegang peranan penting dalam proses perkembangan ekonomi mereka. Sebaliknya di Inggris dan Amerika Serikat peranan pemerintah boleh dikatakan sedikit sekali. Di Inggris kelas-kelas industri dan pedagang menghendaki kebebasan bergerak dan perkembangan ekonomi yang pesat disebabkan adanya kebebasan sesuai dengan paham liberal. Di Amerika Serikat peranan pemerintah terbatas pada pembuatan jalan kereta api, jalan-jalan raya dan pelabuhan, melindungi perusahaan-perusahaan dalam negeri dengan tarif proteksi dan subsidi.

Kebanyakan negara yang sedang berkembang perlu adanya campur tangan pemerintah demi untuk memperlancar pembangunan, halangan untuk berkembang di negara yang sedang berkembang karena perkembangan ekonomi saat ini tidak bersifat spontan, oleh karena itu pemerintah sekarang harus aktif dengan kekuasaan yang ada guna mendobrak semua hambatan.

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Macam-macam lapangan sektor yang disamakan supaya pemerintah bertindak adalah menciptakan pasaran produk ekspor di luar negeri, mendirikan perusahaan-perusahaan negara di bidang yang keuntungannya rendah dan risikonya terlalu besar bagi perusahaan swasta, mengorbankan perusahaan-perusahaan negara pada sektor-sektor yang tidak begitu menarik bagi swasta (fasilitas prasarana umum)

2. Strategi Pembangunan

Memang secara umum hal-hal tersebut diatas ini dapat disetujui, tetapi setekah dirumuskan suatu kebijaksanaan tertentu timbul banyak pendapat.

Misalnya sebagian menghendaki berfungsinya mekanisme harga, tetapi ada pula yang menginginkan pengawasan harga dan perencanaan sentral. Namun pada pokoknya perbedaan pendapat tersebut dapat digolongkan menjadi 2 aliran yaitu: aliran *pertama disebut sebagai "all or nothing approach" (semua atau tidak sama sekali) yang mengatakan bahwa rintangan-rintangan dari perkembangan itu hanya dapat diatasi bila pemerintah mengadakan industrialisasi besar-besaran dan secara cepat* Sedangkan aliran "gradual approach" yang mengatakan bahwa rintangan pertumbuhan sebaiknya dihilangkan secara bertahap.

Dengan demikian menurut "all or nothing approach" pemerintah harus mengadakan rencana-rencana serta program-program, dan selekasnya dapat diadakan akumulasi kapital. Perencanaan itu paling sedikit harus mempunyai 3 (tiga) kelompok target/sasaran yaitu:

1. target produksi yang tegas yang menunjukkan kenaikan produksi barang-barang yang diperlukan.
2. Perhitungan anggaran penanaman modal (investasi) untuk proyek investasi publik seperti jalan-jalan, jembatan, listrik, air dan sebagainya
3. Membuat anggaran untuk "human invesment" yang meliputi pengeluaran pemerintah untuk investasi dalam bidang pendidikan dan membuat peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perseorangan swasta, perusahaan-perusahaan besar dan lembaga-lembaga yang membantu pelaksanaannya.

Jadi aliran pertama menghendaki adanya investasi besar-besaran terutama di sektor-sektor yang belum berkembang. Faktor sosial dan halangan kebudayaan dapat

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

dilemahkan bila perubahan ekonomi dilakukan secara besar-besaran. Untuk itu diperlukan perencanaan dan pengawasan sentral oleh pemerintah.

Kebanyakan program pembangunan sekarang ini menitik beratkan pada perbaikan-perbaikan pertanian, promosi jasa-jasa sosial, perluasan prasarana dan pendirian industri-industri kecil. Alasan-alasan mengapa titik berat usaha atau program pembangunan pada sektor-sektor tersebut ialah bahwa sektor pertanian dan industri kecil merupakan sektor utama dan sektor yang paling banyak mengalami kemiskinan.

Mengenai "sosial overhead capital" memang harus diusahakan oleh pemerintah karena sektor swasta tidak tertarik, sedangkan sektor ini sangat perlu untuk menghindari terjadinya hambatan-hambatan dalam pembangunan. Jasa-jasa sosial seperti sekolah, rumah sakit dan sebagainya yang dapat mengurangi penderitaan penduduk, hendaknya diusahakan oleh pemerintah pula. Sedang pendirian industri kecil karena tidak membutuhkan banyak kapital besar dan relatif membutuhkan sedikit pengetahuan dapat diserahkan kepada pihak swasta. Kebijakan ini cocok di negara yang belum maju, karena kurangnya wiraswasta, dan kurangnya pasar yang mampu menyerap produksi jika terjadi secara besar-besaran. Dengan kata lain rencana pembangunan di negara sedang berkembang hendaknya lebih menitik beratkan pada pertanian, transpor, tenaga listrik dan jasa-jasa sosial untuk pabrik-pabrik. Dengan lancarnya perkembangan sektor pertanian, maka pabrik dapat berkembang, sebab bahan makanan cukup tersedia, tenaga dari sektor pertanian dapat dipindahkan ke sektor industri.

Aliran kedua "gradual approach" mengatakan bahwa pembangunan lebih baik dengan pendekatan secara perlahan-lahan, aliran ini menghendaki adanya perencanaan yang sedikit saja, industrialisasi dilaksanakan secara perlahan-lahan dan mementingkan mekanisme pasar demi berkembangnya usaha-usaha swasta serta memecahkan masalah pembangunan itu dengan bertahap.

Jadi mengenai pendapat "gradualist" bahwa pembangunan dilaksanakan secara perlahan-lahan dan campur tangan pemerintah juga dikehendaki, tetapi pada bidang-bidang tertentu saja. **Dengan demikian perbedaan antara aliran "All or nothing approach" dengan "gradualist" adalah:**

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Aliran all or nothing menghendaki investasi besar-besaran untuk industrialisasi dengan perencanaan pusat. Pemerintah menjalankan pengawasan dan melaksanakan industrialisasi.

Aliran gradualist menghendaki campur tangan pemerintah sedang-sedang saja dan terbatas pada pembuatan rencana yang menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan usaha swasta. Aliran ini dapat lebih mendorong perkembangan ekonomi ke tingkat "self generating" dan kumulatif.

Dalam praktek masing-masing negara mempunyai batas-batas tersendiri, sektor-sektor yang dilakukan oleh pemerintah atau yang dilakukan oleh swasta tergantung pada tujuan yang hendak dicapai, laju pertumbuhan ekonomi, besarnya kekuasaan pemerintah dan sebagainya.

3. Pendidikan dan Kesehatan

Bantuan pemerintah di bidang jasa-jasa sosial terutama pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Di negara yang sedang berkembang, Dua gatra (aspek) ini sangat penting, karena perkembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan umum dapat mengurangi halangan-halangan untuk berkembang dengan mengurangi keterbelakangan penduduk/masyarakat, menambah-mobilitas baik antardaerah maupun antarkerja, menaikkan produktivitas dan memberi kesempatan berinovasi. Ini semua merupakan investasi di bidang kemanusiaan (human investment) yang dapat meningkatkan kualitas penduduk/masyarakat.

a. Pendidikan

Peranan pendidikan sangat luas. Maka disarankan supaya diadakan urutan prioritas antara lain

- perluasan pendidikan di sektor pertanian (pembangunan Masyarakat Desa, Bimas dan sebagainya)
- latihan-latihan yang menyangkut pengetahuan tehnik
- Latihan-latihan dalam bidang pengetahuan tehnik dan administrasi

Dengan demikian dapat diharapkan bahwa sektor pertanian bisa berhasil dan pada tahap berikutnya industri-industri dapat segera didirikan.

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Perpindahan pekerja dari sektor pertanian dan lain-lain pekerjaan tradisional ke sektor yang lebih modern dan rasional tidaklah mudah, karena hal ini mempengaruhi pula psikologi serta adat istiadat para pekerja. Tetapi hal ini dapat diatasi dengan menaikkan tingkat upah, produksi ditujukan pada barang-barang tradisional, pendidikan/latihan-latihan disesuaikan dengan kesenangan dan adat istiadat mereka.

Dalam hal ini diharapkan setiap perubahan hendaknya berlangsung secara perlahan-lahan. Penghapusan buta huruf akan memudahkan latihan-latihan bagi para pekerja. Perlu dihilangkan sikap mengagungkan lapangan kerja kantor (white collar prestige occupation) yang mengakibatkan timbulnya banyak pengangguran intelektual (banyak sarjana yang sukar mencari pekerjaan) Oleh karena itu diharapkan pendidikan hendaknya lebih ditekankan pada pendidikan kejuruan.

Pendidikan di bidang pengetahuan administrasi dan pengawasan juga penting untuk mengadakan koordinasi serta kelangsungan dan kesatuan bertindak. Apabila hal ini tidak ada maka segala program pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Kesehatan

Terpeliharanya kesehatan akan menaikkan produktivitas buruh dan efisien. Makanan harus diperbaiki, penyakit-penyakit harus ditumpas dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan mengadakan vaksinasi periodik, persediaan perumahan sehat dan sebagainya. Kesehatan dipandang dari segi manfaatnya dalam menaikkan tingkat pendapatan dapat dilihat dari dua cara antara lain;

- memperbaiki kualitas angkatan kerja, sehingga mempermudah adanya perkembangan ekonomi.
- Pertumbuhan jumlah penduduk guna mengimbangi kebutuhan tenaga kerja untuk perkembangan lebih lanjut atau dapat pula dilaksanakan pengendalian kelahiran (fertility control) atau pembatasan kelahiran sehingga jumlah penduduk tidak bertambah terlalu banyak, dan kenaikan pendapatan dapat didukung oleh perkembangan jumlah penduduk yang relatif lebih kecil.

4. Fasilitas Pelayanan Umum

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Pemerintah juga harus memberikan prioritas yang cukup dalam perluasan transportasi, komunikasi, tenaga listrik, air dan prasarana-prasarana lain seperti jalan-jalan kereta api, pelabuhan dan telekomunikasi, karena proyek-proyek swasta biasanya menunggu adanya fasilitas prasarana umum.

Investasi dalam fasilitas prasarana umum (social overhead capital) merupakan dasar pertumbuhan perekonomian dan investasi kapital semacam itu jarang dilakukan oleh sektor swasta. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang tidak langsung memberi keuntungan kecuali dalam jangka panjang (gestation period-nya lama) Karena itu pemerintah harus yang melakukannya. Mengenai bentuk pengerjaannya bisa macam-macam misalnya pemerintah dapat mengontrakkan pembuatan jalan-jalan pada swasta atau ditangani sendiri.

Meskipun sebagian besar negara sedang berkembang setuju terhadap peranan pemerintah dalam pendidikan, kesehatan dan public utilities, tetapi kadang-kadang ada perbedaan pendapat dalam peranannya di bidang pertanian, politik fiskal dan moneter.

5. Perbaikan di Bidang Pertanian

a. Penggunaan Teknik Produksi

Perbaikan di bidang pertanian dimaksudkan untuk menaikkan hasil per unit (satuan) luas tanah. Untuk maksud itu diperlukan lebih banyak kapital guna perbaikan teknik pertanian dan efisiensi alat-alat baru maupun land reform. Pendidikan teknik pertanian, dimaksudkan untuk menginsyafkan para petani bahwa dengan teknik baru hasil produksi akan dapat dinaikkan dan untuk memberi pengetahuan pada orang-orang yang diperlukan untuk bekerja dengan metode baru itu. Misalnya penggunaan bibit unggul, pemupukan, pengolahan tanah, penghutanan, atau penghijauan, pemberantasan penyakit dan sebagainya.

Selain itu hendaknya diperhatikan bahwa dalam penggunaan mesin-mesin traktor yaitu apakah di situ banyak pengangguran tak kentara atau tidak. Sebab bila di suatu desa terdapat banyak pengangguran tak kentara, maka penggunaan traktor hanya akan menambah jumlah pengangguran.

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Untuk memindahkan mereka (para penganggur tak kentara atau tersembunyi) lebih dahulu pemerintah harus merangsang kegiatan-kegiatan lain yang kiranya dapat menampung perpindahan tersebut.

Oleh karena itu, ada prinsip bahwa perbaikan di sektor pertanian hendaknya dibarengi dengan industrialisasi yang sesuai dengan politik "balanced growth" (pertumbuhan seimbang) Juga bila jumlah penduduk sangat langka, mekanisme sangat diperlukan supaya hasil produksi rata-rata pekerja dapat naik. Namun perlu diperhatikan bagaimana luas tanahnya, sebab bila tanah pertanian itu sempit, penggunaan traktor juga kurang efisien di samping harganya mahal. Yang dimaksud dengan penggunaan alat-alat baru belum tentu dengan mesin-mesin, tetapi misalnya yang dulunya pakai cetok sekarang menggunakan cangkul dan sebagainya, yang penting ada perubahan cara dari yang kurang produktif kepada yang lebih produktif.

b. Land Reform

Yang dimaksud land reform adalah redistribusi pemilikan tanah supaya penggunaan tanah lebih efisien dengan memberikan kepada petani luas tanah yang mendekati kemampuan maksimum seorang petani dalam mengolah tanah, sehingga mereka dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya dapat langsung dinikmati.

Kegiatan pertanian secara besar-besaran dapat menguntungkan hanya bila sudah ada penggunaan mesin-mesin dan produksi atau tanaman yang dihasilkan adalah sejenis. Maka dari itu kadang-kadang pemilik tanah kecil perlu disatukan, sehingga semua kegiatan dapat dilakukan secara efisien (keuangan, pemasaran, organisasi dan sebagainya) dan dihasilkan output lebih banyak daripada bila kegiatan itu dikerjakan oleh seorang demi seorang.

Kebijakan land reform berbeda-beda di setiap negara, apakah hak milik tanah terlalu sempit atau sebaliknya tergantung pada struktur sosial dan politik yang ada. Pada pokoknya land reform itu ialah distribusi tanah yang efisien sehingga hasil produk yang maksimum dapat tercapai.

Jadi jelas bahwa peranan pemerintah dalam memperbaiki sektor pertanian ialah dengan land reform beserta follow-upnya. Kalau tampak berhasil, maka pemerintah

harus segera memikirkan sektor industri sebagai sektor komplementer agar sebagian penduduk di sektor pertanian dapat dipindah,

supaya tidak terjadi pengangguran terbuka maupun pengangguran tersembunyi.

6. Kebijakan Fiskal

Politik atau Kebijakan fiskal yang efektif perlu dilaksanakan di negara-negara sedang berkembang. Politik ini berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara, dan mempunyai 3 (tiga) pengaruh penting untuk perkembangan ekonomi yaitu:

- dapat mempengaruhi pendapatan nasional
- memajukan akumulasi kapital
- dan menahan inflasi ataupun deflasi

Pengeluaran pemerintah untuk suatu sektor tertentu akan menarik faktor-faktor produksi ke sektor tersebut. Sedangkan pajak yang dikenakan pada sektor tertentu akan menghalangi mengalirnya faktor-faktor tersebut ke sektor itu. Karena proses yang demikian, maka pola penerimaan dan pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi. Pajak akan membatasi tumbuhnya industri dan sebaliknya subsidi akan mendorong berkembangnya industri.

7. Kebijakan Moneter

Kebijaksanaan moneter juga pegang penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dengan mempengaruhi tersedianya jumlah uang yang beredar dan perkreditan guna menanggulangi inflasi serta mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Bila perkembangan sudah mulai maka perlu kebijaksanaan moneter yang efektif untuk memberikan kredit yang sesuai dengan dengan perkembangan dalam perdagangan dan kegiatan-kegiatan produksi.

Supaya pemerintah dapat menjalankan kebijaksanaan moneter maka negara sedang berkembang pertama-tama harus memperbaiki sistem keuangan dan perkreditannya.

Jadi diperlukan adanya lembaga-lembaga keuangan dan perbankan yang dapat memberikan fasilitas kredit dan penyaluran tabungan ke sektor-sektor yang produktif.

Dikatakan bahwa kebijaksanaan moneter dengan mengadakan kredit selektif untuk mempengaruhi pola investasi dan produksi, dimaksudkan untuk membedakan biaya dan ketersediaan kredit ke sektor-sektor yang berbeda-beda. Bank sentral dapat pula mengawasi Bank-Bank umum untuk mempengaruhi macam investasi, misalnya dengan menggunakan tingkat bunga diskonto yang berbeda-beda menurut jenis pinjaman yang bersangkutan. Kebijakan moneter dalam peranannya sebagai alat pembentukan kapital merupakan kebijaksanaan sekunder setelah kebijaksanaan fiskal. Dengan kebijaksanaan uang mudah (*easy money policy*) kredit dapat diperluas, tetapi kredit inipun tidak bisa digunakan kecuali bila ada harapan mendapat keuntungan cukup tinggi.

Dalam hal mengatasi inflasi, pemerintah dapat bergerak dalam jual beli surat-surat berharga (*open market operation*), merupakan sarana pokok untuk mengatasi inflasi.

8. Adanya Kewiraswastaan

Mendorong timbulnya semangat wiraswasta merupakan tantangan paling berat bagi pemerintah negara sedang berkembang. Di samping pemerintah harus mendorong tumbuhnya wiraswasta dalam negeri juga harus menarik wiraswasta dari luar negeri atau pemerintah sendiri bertindak aktif sebagai wiraswasta. Namun wiraswasta dari luar negeri biasanya tidak disukai, karena seolah-olah ada rasa kolonialisme atau pengaruh luar negeri.

Bila pemerintah bertindak sebagai wiraswasta hendaknya terbatas pada penyediaan fasilitas umum serta pemeliharannya, agar dengan demikian dapat mendorong wiraswasta di bidang lain sehingga proses perkembangan dapat berjalan dengan sendirinya (*selfstaining*) Meskipun pemerintah dapat mendorong, merencanakan dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan pembangunan, serta memobilisasi sumber-sumber produksi tetapi kekurangan wiraswasta harus segera

diatasi. Pemerintah dalam hal ini harus berani membangun proyek-proyek yang dapat menarik usaha-usaha swasta. Pemerintah dapat secara tidak langsung mendorong timbulnya para wiraswasta misalnya dengan pengembangan fasilitas/prasarana umum,

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

jaminan hak milik, stabilitas ekonomi, pajak yang menguntungkan dan menyediakan bantuan kredit.

Kesulitan menumbuhkan wiraswasta terletak pada tidak adanya kemauan mengetrapkan kemampuan organisasi untuk usaha produksi, halangan-halangan adat dan kebiasaan, kurangnya insentif ekonomi, tidak adanya mobilitas vertikal, pandangan rendah terhadap kedudukan para pengusaha, ketidaksempurnaan pasar yang membuat kaum wiraswasta menjadi segan untuk mengusahakan barang baru, dan perubahan-perubahan hukum serta peraturan-peraturan pemerintah menyebabkan keadaan ekonomi tidak pasti bagi wiraswasta.

Pada prinsipnya untuk mengatasi kekurangan jumlah wiraswasta, perlu ditambahkan motivasi dengan cara memajukan kemampuan dan membuat iklim/suasana yang baik bagi adanya wiraswasta. Sudah tentu mengubah motivasi dan kemampuan memerlukan perubahan dalam adat kebiasaan serta lembaga-lembaga sosial yang ada.

Dalam jangka pendek kegiatan-kegiatan wiraswasta dapat didorong dengan jalan mendirikan koperasi, industri kecil, dan industri besar yang dapat disewakan atau dibeli oleh swasta.

Sedangkan dalam jangka panjang kegiatan pemerintah dapat memperbaiki struktur keuangan, perpajakan dan teknik produksi sehingga swasta dapat mengembangkan industri yang cocok dalam perekonomian tersebut. Bila proyek pemerintah ini berhasil berkembang, maka investasi swasta pasti akan bertambah pula.

Bertambahnya semangat untuk menjadi wiraswasta tergantung pada perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan dalam lembaga-lembaga dan struktur sosial yang ada. Meskipun usaha itu dapat dipergiat tapi hasrat ini harus berasal dari negara sedang berkembang itu sendiri dan tidak dapat dipaksakan dari luar.

Yang penting sekarang ialah penyaluran kegiatan-kegiatan wiraswasta penuh semangat dari perdagangan dan spekulasi kearah kegiatan - kegiatan ekonomi yang produktif.

Jadi ada dua kemungkinan untuk mendorong timbulnya wiraswasta yaitu:

1. Pemerintah mengambil tindakan inovasi.
2. Swasta dapat menirunya

Inovasi teknologi dapat diambil dari luar negeri. Bila perkembangan ini berhasil maka jumlah wiraswasta akan bertambah banya, sebab bila wiraswasta membantu perkembangan, maka perkembangan akan membantu tambahnya wiraswasta pula.

9. Kebijakan Ekonomi Luar Negeri

1. Kebijakan Pemerintah.

Perdagangan barang-barang produksi pertanian dan manufaktur (pabrik) sama pentingnya, tetapi kadang-kadang dikatakan bahwa perdagangan hasil pertanian tidak begitu menguntungkan dibandingkan dengan perdagangan barang-barang hasil industri.

Biasanya Negara sedang berkembang melaksanakan kebijakan perdagangan internasional untuk melindungi industri dalam negeri, misalnya; dengan proteksi, subsidi, dan *multiple exchange rates*. Namun kebijakan tarif untuk proteksi mempunyai kelemahan bahwa konsumen dipaksa mengkonsumsi barang-barang dalam negeri yang lebih rendah kualitasnya, sedangkan para produsen justru dimanja.

Cara lain untuk mendorong perkembangan ekonomi ialah dengan memberikan subsidi pada industri-industri tertentu. Subsidi ini, dapat memperendah harga penjualan, sehingga subsidi akan mendorong produksi dan mobilitas tenaga kerja.

Disamping cara di atas ada lagi yang disebut *multiple exchange rates* yaitu kurs devisa berbeda-beda bagi barang-barang yang diimpor. Hal ini dapat mengatur penggunaan devisa sebaik-baiknya, karena importir harus membeli devisa tersebut dari pemerintah dengan kurs yang berbeda-beda

Jadi kebijakan perdagangan yang restriktif dapat memperbaiki Neraca Pembayaran Internasional, dan persetujuan perdagangan dimaksudkan untuk membatasi produksi, mengawasi ekspor serta impor dan mengatur harga barang-barang bersangkutan sehingga tercapai harga yang stabil.

2. Bantuan Teknis

Bantuan Teknis penting untuk pembangunan negara sedang berkembang. Adapun yang dimaksud dengan bantuan teknis ialah mengatur atau membentuk "tim internasional" untuk memberi nasihat kepada pemerintah negara sedang berkembang dalam hubungannya dengan fasilitas-fasilitas untuk pendidikan di luar negeri, mengatur

penyelenggaraan latihan-latihan bagi para teknisi serta memberi fasilitas untuk membantu pemerintah negara sedang berkembang dengan menyediakan tenaga-tenaga ahli, perlengkapan-perengkapan dan mengorganisir jasa-jasa tersebut untuk pembangunan ekonomi negara sedang berkembang.

Hanya soalnya sejauh mana teknik yang baru itu dapat diterapkan di negara di negara sedang berkembang tersebut? Karena itu bantuan teknis harus dibarengi dengan perubahan-perubahan sosial yang menyertai perubahan teknik yang bersangkutan.

3. Investasi Asing Swasta

Investasi ini dapat berbentuk "investasi langsung" (Foreign Direct Investment) yaitu langsung punya usaha di situ dan di "investasi portofolio" yaitu membeli saham-saham perusahaan di negara sedang berkembang.

Investasi teknik-teknik dan keahlian baru dapat ditiru oleh negara sedang berkembang, tetapi investasi asing itu tidak banyak karena biasanya investasi tersebut terbatas pada proyek-proyek ekspor dan tidak untuk kepentingan negara yang sedang berkembang itu. Oleh karena itu negara sedang berkembang tidak menyukainya.

Dari segi pandang investor, memang lebih senang investasi untuk proyek-proyek yang menguntungkan, sebab kalau proyek-proyek itu untuk keperluan dalam negeri negara sedang berkembang biasanya kurang menguntungkan investor.

Lagi pula pihak investor asing juga segan untuk mengadakan investasi di negara sedang berkembang, antara lain karena tidak ada jaminan mengenai keadaan politik dan sosial di negara tersebut, sehingga tipis harapan miliknya dapat kembali. Kalau negara sedang berkembang tetap menginginkan investasi asing swasta, maka pemerintah setempat harus dapat menjamin terhadap resiko hilangnya investasi tersebut.

4. Investasi Asing Pemerintah

Investasi asing pemerintah, berupa pinjaman dan hadiah dari pemerintah asing atau badan-badan internasional kepada pemerintah negara sedang berkembang.

Biasanya investasi ini dapat digunakan sekehendak negara peminjam. Badan-badan internasional ini misalnya IBRD, sekarang dikenal dengan Bank Dunia,

tugasnya antara lain menjamin investasi asing swasta dan memobilisir investor-investor asing swasta.

Sebenarnya bantuan yang diberikan, baik berupa pinjaman ataupun hadiah dan lain-lain dari luar negeri hanya merupakan tambahan modal saja, sedangkan yang penting bagi pembangunan ekonomi ialah modal yang ada dalam negeri itu sendiri.

5. Kebijakan Tata Niaga

a. Pola Umum Pengembangan Sektor Industri

Pada umumnya negara-negara yang berusaha meningkatkan pendapatan nasional lewat pembentukan nilai tambah di dalam negeri dan berusaha menciptakan lapangan kerja, menenmpuh jalan pembangunan dan pengembangan sektor industri. Agar supaya sektor industri pengolahan (manufacturing industry) dapat berhasil berkembang, harus ada jaminan pasar yang akan menyerap hasil-hasil produksinya. Mengenai pasar yang dapat menyerap hasil produksi itu, dapat dibedakan menjadi pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.

b. Pengaturan Tata Niaga dan Permasalahan.

Suatu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka mempunyai banyak peluang untuk mengembangkan pasar ekspor dan dengan demikian memiliki potensi untuk memanfaatkan skala ekonomis pada industri barang-barang eksportnya. Akan tetapi, di lain pihak, karena kebijaksanaan ekonomi terbuka itu juga, negara yang bersangkutan mempunyai peluang untuk menjadi pasar barang-barang impor. Kesalahan dalam memanfaatkan kebijaksanaan ekonomi terbuka itu bisa berakibat menurunnya surplus neraca pembayaran.

Dengan demikian, kebijaksanaan ekonomi terbuka memiliki keuntungan dan kelemahan. Agar kebijaksanaan tersebut tidak merugikan perekonomian dalam negeri secara keseluruhan, harus disusun suatu peraturan tata niaga tertentu sedemikian rupa sehingga dapat mendorong perekonomian nasional untuk tumbuh lebih sempurna.

1. Pola Ekspor (Outward Looking)

Sehubungan dengan pola ekspor untuk mengembangkan industri dalam negeri, maka pengaturan seyogyanya diarahkan untuk mendukung pola ekspor tersebut. Pola ekspor dapat didukung dengan pola tata niaga yang mampu mendatangkan bahan mentah, bahan penolong maupun keahlian (*skill*). Biasanya seperti telah tersebut di atas negara-negara yang menggunakan pola ekspor ini miskin akan bahan mentah (sumber daya alam), tetapi berlimpah dalam hal tenaga kerja. Dengan demikian dari segi tata niaga barang impor dalam pola

pengembangan ekspor, perlu adanya pembebanan tarif yang ringan atau kelonggaran peraturan dalam bidang impor bahan mentah dan bahan penolong. Kebaikan dari pola ini ialah terciptanya kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, serta munculnya negara eksportir dalam pasaran dunia.

Kelemahan pola ini berupa tuduhan bahwa negara eksportir mengorbankan negara-negara importir. Misalnya sekarang ini banyak negara merasa menjadi jajahan ekonomi Jepang, karena hampir semua barang produksi Jepang ada di pasaran internasional. Oleh karena itu strategi ini sudah mulai ditinggalkan oleh pelopor strategi ekspor itu sendiri.

Sistem pengaturan tata niaga yang diperlukan menghendaki adanya campur tangan pemerintah khususnya untuk mendorong ekspor hasil produksi dalam negeri, dan sementara impor barang-barang jadi dari luar negeri perlu dikendalikan.

2. Pola Pasar dalam Negeri

Untuk strategi pengembangan pasar dalam negeri, tersedianya sumberdaya alam sebagai bahan mentah merupakan persyaratan utama. Dengan tersedianya bahan mentah yang cukup dan murah harganya serta didukung oleh tersedianya tenaga kerja dan skill yang cukup maka pengembangan sektor industri dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pasar dalam negeri,

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

sehingga perkataan barang-barang produksi dalam negeri dapat bersaing dengan barang-barang impor.

Karena itu pengaturan tata niaga yang diperlukan justru seyogyanya mendukung persaingan bebas agar mutu produksi dalam negeri dapat segera meningkat dan mampu bersaing dengan barang impor. Namun demikian dapat pula perlindungan diberikan pada permulaan pertumbuhan industri (*infant industry argument*), yang

kemudian setelah ada perkembangan, sedikit demi sedikit perlindungan dapat dikurangi dan akhirnya dihapuskan.

Impor bahan mentah atau bahan setengah jadi seyogyanya dikenakan tarif yang tinggi untuk mendorong penggunaan bahan mentah dalam negeri.

Pada umumnya kebanyakan negara tidak mau mengekspor bahan mentah, karena mereka lebih senang mengekspor bahan jadi agar nilai tambah yang diterima dapat lebih tinggi dan kesempatan kerja lebih luas. Kelemahan dari pola pengembangan pasar dalam negeri ialah bahwa pasar dalam negeri biasanya cepat jenuh dan harus segera dicari pasaran di negara lain. Pola ini lebih mudah dikembangkan daripada pola ekspor karena bahan mentah dan tenaga kerja cukup tersedia dan pasaran mudah dijangkau.

3. Tarif

Seringkali tarif dianggap sebagai alat yang cukup efektif untuk menanggulangi impor atau membatasinya. Namun demikian sering terjadi tarif kurang efektif untuk membatasi impor barang-barang tertentu dan bahkan tidak cukup mendorong produksi dalam negeri. Hal ini sangat tergantung pada elastisitas penawaran barang produksi dalam negeri atau juga sangat tergantung juga pada elastisitas permintaan atas barang yang bersangkutan. Biasanya tarif ditujukan untuk membatasi impor barang-barang tertentu dan mendorong produksi barang sejenis di dalam negeri.

Dalam kasus permintaan dalam negeri sangat inelastis terhadap harga maka tarif harus segera diikuti dengan produksi dalam negeri yang cukup.

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

Akan tetapi sering produksi dalam negeri tidak dapat memanfaatkan peluang-peluang yang cukup baik. Atau sering disebut produksi dalam negeri pada umumnya inelastis terhadap harga.

Jadi walaupun akibat tarif bisa meningkatkan harga barang di dalam negeri, tetapi produksi tidak dapat ditambah dalam jangka pendek.

Seringkali tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang sifatnya "parsial" artinya belum sempat dipertimbangkan kemungkinan

dampaknya pada barang-barang lain, khususnya antara industri hulu dan industri hilir.

Misalnya, apabila tarif dikenakan pada bahan mentah dengan tujuan melindungi produksi bahan mentah dalam negeri, maka tindakan itu dapat menimbulkan kenaikan harga barang jadi karena produser barang jadi harus menggunakan bahan mentah yang mahal harganya sebagai akibat kenaikan tarif tersebut.

Keadaan itu hanya bisa terjadi bila tidak ada impor barang jadi yang sejenis. Apabila dimungkinkan adanya impor barang jadi yang sejenis, maka tindakan proteksi (dengan tarif) terhadap bahan mentah secara tidak langsung justru mengundang impor barang jadi yang berkaitan. Dengan demikian dapatlah dirumuskan bahwa, tindakan proteksi tarif harus mempertimbangkan semua dampak pada semua komoditi yang berkaitan mulai dari industri hilir sampai hulu.

Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa pengenaan tarif pada barang yang disusulkan industri hulu akan mengundang impor barang jadi dan sebaliknya pembebanan tarif pada barang yang disusulkan industri hilir akan menyebabkan impor barang yang disusulkan industri hulu. Karena pembebanan tarif pada seluruh rantai industri tidak mungkin dilakukan, maka pembebanan tarif harus selektif, yaitu pada mata rantai industri tertentu, dimana industri dalam negeri yang bersangkutan memiliki potensi efisiensi yang tertinggi.

4. Quota

Cara lain untuk membatasi impor barang adalah dengan kuota. Dari segi kuantitas kuota lebih efektif dalam membatasi jumlah barang yang diimpor, sehingga mengakibatkan tingginya harga barang dan terbatasnya jumlah barang.

Seperti halnya dengan tarif pihak yang menikmati keuntungan dari adanya kuota, adalah pihak produsen importir di dalam negeri, tetapi kuota merugikan pihak produsen di luar negeri. Oleh karena itu kuota dan tarif seringkali menimbulkan tindakan pembalasan dari partner dagang.

Sehubungan dengan sifat dan dampak kuota itu, maka kuota sering diterapkan secara terselubung atau paling tidak secara sangat hati-hati. Disamping semua pertimbangan di atas, kuota harus juga diterapkan setelah mempertimbangkan dampaknya terhadap industri lain yang berkaitan. Kuota yang dikenakan atas barang yang dihasilkan industri hulu dapat mengundang impor barang-barang sejenis pada industri hilir, karena harga barang yang bersangkutan menjadi mahal sebagai akibat besarnya marjin yang dinikmati ”produsen importir”

5. Penunjukan Importir

Penunjukan importir oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi/mengontrol jumlah barang impor yang masuk, tetapi bukan karena adanya kuota. Efek dari penunjukan importir ini sebenarnya tidak berbeda dengan kuota, tetapi lebih pada adanya unsur monopoli pada importir yang ditunjuk. Hanya agar tidak terjadi tindakan balasan dari negara pengekspor maka dilakukan tindakan kuota terselubung semacam itu. Produsen eksportir tidak merasakan kerugian secara langsung dari akibat tindakan penunjukan importir itu seperti halnya dalam kuota. Jadi penunjukan importir juga

cenderung mendorong harga barang impor meningkat. Penunjukkan importir mengakibatkan adanya semacam monopoli impor. Sehingga importir yang ditunjuk menikmati terlalu banyak keuntungan. Hal ini akan dapat mengakibatkan timbulnya *high cost economy* (ekonomi biaya tinggi)

Meskipun demikian penunjukkan importir tetap bisa dilakukan untuk barang-barang industri yang bukan barang strategis, sehingga tidak memiliki dampak berantai pada jenis komoditi-komoditi penting lainnya.

XII.Pembangunan Ekonomi

12.Perbedaan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.

12.1. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah proses meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat dalam jangka panjang. Dari definisi tersebut diatas terdapat 3 (tiga) pokok pikiran yang perlu diperhatikan yaitu:

- iv. Pembangunan ekonomi merupakan proses mengubah keadaan perekonomian dari suatu keadaan tertentu menuju ke keadaan yang diinginkan.
 - v. Bertujuan meningkatkan pendapatan per kapita yang merupakan ukuran untuk menilai berkembang dan tidaknya perekonomian suatu negara. Dengan demikian maka tujuan pembangunan ekonomi tercapai/terwujud, bila pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dari waktu ke waktu.
 - vi. Pelaksanaannya dalam waktu panjang (waktu untuk pencapaian tujuan)
- Dalam hal ini, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila pada waktu-waktu yang ditentukan, hasil ekonomi sesuai dengan yang direncanakan.

Pembangunan ekonomi dilakukan dalam jangka panjang yang berarti jangka panjang lebih dari 25 tahun..

Di Indonesia, pelaksanaan pembangunan ekonomi dibuat secara bertahap. Setiap tahap prioritas pembangunan, direncanakan selesai dalam jangka 5 tahun sebagaimana yang kita kenal dengan sebutan PELITA (Pembangunan Lima Tahun)

12.2. Persamaan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

12.2.1. Merupakan suatu kecenderungan (trend) di bidang perekonomian suatu negara.

12.2.2. Tujuan akhir (sebagai tolak ukur) adalah besarnya pendapatan per kapita.

12.3. Perbedaan pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan	Pembangunan
a. kenaikan GNP	a. prose kenaikan GNP
b. tidak memandang perubahan yang	b. kenaikannya disertai dengan

terjadi dalam struktur ekonomi	perubahan yang terjadi dalam
c. tidak memandangmana yang lebih	struktur ekonomi
besar/kecil antara GNP dengan	c. adanya aspek pemerataan
pertambahan penduduk	pendapatan

12.4. Hubungan antara Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan perekonomian suatu negara yang terlihat pada adanya kenaikan pendapatan per kapita penduduknya dari waktu ke waktu.

Pembangunan ekonomi merupakan alat atau sarana mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut.

12.5. Faktor-faktor dan Kreteria

12.5.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan Ekonomi Suatu negara

1. Pengertian

Cepat lambatnya perkembangan ekonomi, tergantung dari factor-faktor yang mendukung di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Pengertian tentang perkembangan ekonomi bisa juga diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi, yaitu tingkat pertambahan pendapatan nasional. Lebih jauh lagi, bukan semata-mata pendapatan nasional yang dipakai sebagai tolak ukur perkembangan ekonomi, sebab hal tersebut dibarengi dengan pertambahan penduduk.

Maka untuk menentukan apakah perekonomian suatu negara itu berkembang, bukan hanya pendapatan nasional saja yang dipakai untuk mengukurnya, tetapi tingkat pertambahan pendapatan per kapita.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan Ekonomi.

a. Faktor Alam

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

- Faktor alam meliputi kesuburan tanah, iklim, hasil hutan, barang tambang, hasil laut, dan semua yang disediakan alam dan berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- Kekayaan alam merupakan factor yang sangat berpengaruh untuk membangun perekonomian suatu negara. Terutama bagi negara yang sedang atau mulai berkembang, prioritas utama yang dipakai untuk modal pembangunan adalah pertanian dan pertambangan (kebutuhan primer) Akan tetapi kekayaan alam tersebut tidak banyak berarti apabila tidak diimbangi dengan kemampuan di dalam pengolahannya.
- Contoh negara yang menekankan factor alam sebagai tolak ukur perkembangan ekonomi adalah negara-negara Timur Tengah. Negara-negara Timur Tengah menyandarkan pada tambang minyak bumi sebagai modal dasar perkembangan ekonomi..

b. Faktor Teknologi dan Barang-barang Modal

Perkembangan ekonomi menjadi lebih cepat apabila didukung oleh factor kemajuan teknologi.

Teknologi merupakan langkah lanjut dari peranan barang-barang modal untuk perkembangan ekonomi.

Makin canggih teknologi berarti makin tinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi.

Kemajuan teknologi berarti yang mendorong perkembangan ekonomi banyak terjadi di beberapa negara, hal ini disebabkan karena:

1. mempertinggi efisiensi produksi
2. menimbulkan penemuan-penemuan produk baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya.
3. mempertinggi kualitas barang yang diproduksi

Contoh negara yang perkembangan ekonominya cepat karena didorong kemajuan teknologi adalah Jepang.

c. Faktor Budaya.

Para ahli ekonomi di dalam membicarakan permasalahan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang selalu menekankan pada system budaya masyarakat negara tersebut.

Adat istiadat dan tata cara tradisional biasanya menjadi penghambat di dalam pembangunan, sehingga perkembangan ekonomi tidak bisa dipercepat dan lahan yang tersisa sangat kecil.

Sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai seberapa jauh pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

Sikap masyarakat yang mendorong pembangunan ekonomi, misalnya, sikap hemat dengan tujuan menabung untuk investasi:

- sikap kerja keras untuk mengembangkan usaha.
- Sikap di dalam berusaha untuk menambah keuntungan

Contoh negara yang mengalami perkembangan ekonomi yang didukung oleh factor budaya adalah jepang.

3. Faktor lain yang Mempengaruhi terhadap perkembangan ekonomi antara lain:

a. Kualitas tenaga kerja

Pertambahan penduduk berarti besar kemungkinannya untuk menambah produksi. Untuk hal tersebut perlu adanya pendidikan, latihan-latihan, dan pengalaman dari tenaga kerja itu sendiri.

Akan tetapi bagi negara yang sedang berkembang pertumbuhan penduduk justru merupakan penghambat. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan dengan tingkat pendapatan negara tersebut.

12.5.1. Faktor pasar sebagai sumber pertumbuhan.

Tingkat kegiatan perekonomian ditentukan oleh permintaan efektif. Luas pasar memegang peranan di dalam kegiatan perekonomian. Makin luas

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroellah

pasar, makin luas sumber pertumbuhan perekonomian. Maka, wajarlah para pengusaha berproduksi dengan teknologi tinggi. Jika para pengusaha berproduksi dengan teknologi rendah maka produktivitasnya rendah, dan pendapatan tenaga kerja juga rendah. Kejadian ini membatasi luasnya pasar dan menghambat proses perkembangan ekonomi.

Kreteria

Kreteria yang biasa dipakai untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara antara lain:

1. Pendapatan Nasional

- Tingkat pendapatan nasional yang tinggi mencerminkan jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perekonomian tersebut berjumlah besar
- Dalam keadaan *ceteris paribus*, dengan terpenuhinya pemuas kebutuhan, berarti tingkat kemakmuran yang dicapai oleh negara yang bersangkutan tinggi
- Tingkat pendapatan nasional yang tinggi berarti kapasitas produksi nasional tinggi dan tingkat kesempatan kerja juga tinggi.

2. Produksi Nasional

Usaha perkembangan ekonomi bagi negara-negara terbelakang adalah bagaimana cara meningkatkan kapasitas produksi nasionalnya. Dalam hal ini mempunyai tujuan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan (*groth rate*) kapasitas produksi nasional..

3. Kesempatan Kerja

Suatu pertumbuhan ekonomi yang terjadi dengan sarana teknologi tinggi terkadang menimbulkan dampak negatif yang berupa pengangguran, dimana hal tersebut menimbulkan gejala ekonomi yang tidak diinginkan oleh negara mana pun.

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroellah

Dengan demikian apabila suatu negara mampu mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, berarti negara tersebut mampu mempercepat laju perkembangan ekonominya.

4. Perekonomian Stabil

Stabilitas ekonomi meliputi stabilitas tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, dan stabilitas tingkat harga yang mempengaruhi pasar produk dalam negara. Suatu negara dikatakan berhasil di dalam perkembangan ekonominya, apabila mampu menjaga stabilitas ekonominya.

5. Neraca Pembayaran Luar Negeri

Suatu negara yang mengalami defisit maupun surplus neraca pembayaran luar negeri pada dasarnya merupakan keadaan yang tidak diinginkan. Negara manapun menghendaki neraca pembayaran luar negeri yang seimbang. Akan tetapi kalau ditinjau dari segi politik, neraca pembayaran yang surplus lebih baik daripada neraca pembayaran yang seimbang., tetapi negara manapun tidak menghendaki terjadi neraca pembayaran yang defisit.

6. Distribusi Pendapatan

Negara yang mempunyai pendapatan nasionalnya tinggi, kesempatan kerja tinggi dan tingkat harga stabil, belum tentu aman dalam melanjutkan perkembangan ekonomi ke tingkat kemakmuran.. Sebagai kelengkapannya adalah distribusi pendapatan yang merata.

Apabila pendapatan tidak merata akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dan ketegangan sosial. Akibatnya kehidupan masyarakat tidak tenteram. Untuk distribusi pendapatan yang merata, Indonesia menerapkannya melalui PELITA dengan tujuan yaitu 8 (delapan) jalur pemerataan yang terdiri dari:

Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan perumahan.

Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan

Pemerataan pembagian pendapatan
Pemerataan kesempatan kerja
Pemerataan kesempatan berusaha
Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita
Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

Pola Kebijaksanaan Pembangunan Ekonomi

1. Pembangunan Ekonomi di Negara-negara Berkembang

Setiap negara mempunyai tingkat perekonomian yang berbeda-beda, perbedaan tersebut disebabkan karena situasi politik, sosial, dan ekonomi yang masing-masing mempunyai hubungan timbal balik dan masih ditambah suatu falsafah yang dianut suatu negara, dan faktor sejarah terjadinya negara tersebut.

Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang tidak sama. Tiap negara mempunyai pola tersendiri tergantung pada situasi politik, kekayaan alam, dan falsafah negara.

2. Pola Pembangunan Ekonomi Ketat dan Pola Longgar.

- Pola Pembangunan Ekonomi Ketat Pelaksanaan
Pembangunan ekonomi yang menggunakan pola ketat terdapat pada suatu negara yang menganut sistem perekonomian terpusat. Semua perencanaan perekonomian, direncanakan oleh pemerintah pusat. Demikian pula untuk masalah produksi dan distribusinya dan konsumsi diatur oleh pemerintah. Adapun tujuan pelaksanaan pola ketat agar rencana yang telah ditetapkan dan anggaran yang telah disediakan dapat berjalan dengan lancar dan terarah. Dengan demikian dapat dihindarkan hal-hal yang terlebih lagi

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

menghambat pembangunan yang dilaksanakan dengan biaya sangat terbatas.

- **Pola Pembangunan Ekonomi Longgar**

Alasan pemerintah suatu negara melaksanakan pola longgar antara lain:

dengan keterbatasan dana maka dilibatkan pihak lain (swasta) daripada harus utang ke luar negeri

mengajak partisipasi aktif masyarakat agar timbul rasa memiliki. Karena dengan rasa memiliki maka akan timbul rasa nasionalisme.

urusan negara bukan semata-mata hanya urusan pemerintah tetapi seluruh warga negara mempunyai tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negaranya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi pola ketat dan pola longgar mempunyai perbedaan dan persamaannya.

Perbedaannya yaitu:

1. Dalam pola ketat semua diatur oleh pemerintah
2. Dalam pola longgar, pemerintah bersama-sama dengan pihak lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Persamaannya:

Sama-sama mempunyai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat

3. Pola Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi di Indonesia dilakukan secara berencana dan bertahap yang dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan negara (GBHN) Di dalam GBHN Pola Pembangunan Nasional terdiri dari:

a. Pola Dasar Pembangunan Nasional

Di dalam pola dasar pembangunan nasional diletakkan dasar-dasar bagi perjuangan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional. Adapun tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

b. Landasan Pembangunan Nasional

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka landasan pelaksanaan pembangunan nasional adalah:

- Pancasila
- Undang-Undang dasar 1945

c. Asas-asas Pembangunan Nasional

1. asas manfaat
2. asas usaha bersama dan kekeluargaan
3. asas demokrasi
4. asas adil dan merata
5. asas perikehidupan dalam keseimbangan
6. asas kesadaran hukum
7. asas kepercayaan pada diri sendiri

d. Modal Dasar dan Faktor-faktor Dominan

Modal dasar pembangunan nasional yang dimiliki oleh rakyat dan bangsa Indonesia ialah:

1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia
2. Kedudukan geografis Indonesia
3. Sumber-sumber kekayaan alam
4. Jumlah penduduk yang besar
5. Modal rohaniah dan mental
6. Modal budaya

Diktat Pengantar Ekonomi Makro
Oleh: R.Agoes Kamaroella

7. Potensi efektif bangsa merupakan segala sesuatu yang bersifat potensial dan produktif yang telah dicapai termasuk kekuatan sosial politik antara lain Partai Politik

8. Angkatan Bersenjata

Faktor-faktor dominan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia antara lain:

1. Faktor demografi dan sosial budaya
2. Faktor geografi, hidrografi, geologi, dan topografi
3. Faktor klimatologi
4. Faktor flora dan fauna
5. Faktor kemungkinan pengembangan

e. Wawasan Nusantara

Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan nusantara yang mencakup:

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik
2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan social budaya
3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.
4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

f. Ketahanan Nasional

1. kemampuan dan katangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya
2. sarana untuk mengatasi terjadinya tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan yang timbul dari luar maupun dari dalam
3. pendorong bagi kelanjutan pembangunan nasional

